

**DINAMIKA KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2005-2006**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

oleh
ANANDA RIZKI SETIAWAN
NIM. 1817503004

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ananda Rizki Setiawan
NIM : 1817503004
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Dinamika Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2005-2006”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Ananda Rizki Setiawan

NIM.1817503004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Dinamika Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera Tahun
2005-2006**

Yang disusun oleh Ananda Rizki Setiawan (NIM 1817503004) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora** (S. Hum) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Hj. Ida Novianti M.Ag
NIP. 197111042000032001

Penguji II

Arif Hidayat S.Pd, M.Hum
NIP. -

Ketua Sidang/Pembimbing

Nurrohm Lc., M.Hum
NIP. 198709022019031011

Purwokerto, 2 Mei 2023

Dekan



Dr. Hj. Naqivah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Sdr. Ananda Rizki Setiawan

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekam FUAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ananda Rizki Setiawan
NIM : 1817503004
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul : Dinamika Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan
Sejahtera Tahun 2005-2006

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Humaniora (S.Hum).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

. Pembimbing



Nurrohim, L.c., M.Hum

DINAMIKA KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2005-2006

Ananda Rizki Setiawan

1817502004

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. Ahmad Yani 40-A Purwokerto 53126

Email: rizkiananda680@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Muhammadiyah di tahun 2005-2006 dan Dinamika Konflik Muhammadiyah di tahun 2005-2006. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menitikberatkan pada kajian pustaka. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar ataupun arsip dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Ralf Dahrendorf. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, konflik ideologi yang terjadi didasari oleh sebab perilaku dan tindakan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dengan mengatasnamakan dakwah masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah lalu menyebarkan ideologi dan menggunakan amal usaha, lembaga, orthonom dan fasilitas yang dimiliki atau dinaungi Muhammadiyah untuk kepentingan politik yakni meraup suara, simpati dan dukungan dari warga Muhammadiyah. *Kedua*, dinamika konflik Muhammadiyah di tahun 2005-2006 dapat dibagi menjadi 5 tahapan yakni pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik. Awalmula terjadinya konflik, munculnya tanggapan dari kalangan Muhammadiyah hingga diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 149 tahun 2006 munculnya berbagai kasus infiltrasi oleh Partai Keadilan Sejahtera diberbagai lingkungan Muhammadiyah melahirkan sikap tegas untuk mempertahankan keutuhan Persyarikatan Muhammadiyah dengan meyakini bahwa walaupun Partai Keadilan Sejahtera mengklaim sebagai partai dakwah, Partai Keadilan Sejahtera tetaplah partai politik yang menginginkan kekuasaan, dan setiap warga Muhammadiyah harus berpegang teguh kepada Khittah Muhammadiyah.

Kata kunci: Muhammadiyah, PKS, Konflik, Infiltrasi.

The Dynamics of the Conflict between Muhammadiyah an the Prosperous Justice Party in 2005-2006

Ananda Rizki Setiawan

1817502004

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. Ahmad Yani 40-A Purwokerto 53126

Email: rizkiananda680@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the conflict between the Prosperous Justice Party and Muhammadiyah in 2005-2006 and the Dynamics of Muhammadiyah Conflict in 2005-2006. This study uses historical research methods with an emphasis on literature review. The sources used in this study were taken from books, scientific journals, articles, newspapers or archives using descriptive analysis methods. The theoretical foundation used in this research is Ralf Dahrendorf's conflict theory. The results of this study show that: First, the ideological conflict that occurs is based on the behavior and actions carried out by the Prosperous Justice Party on behalf of da'wah entering Muhammadiyah and then spreading ideology and using business charities, institutions, autonomy and facilities owned or managed by Muhammadiyah for political purposes, namely to gain votes, sympathy and support from Muhammadiyah members. Second, the dynamics of the Muhammadiyah conflict in 2005-2006 can be divided into 5 stages, namely pre-conflict, confrontation, crisis, consequences and post-conflict. At the beginning of the conflict, the emergence of responses from Muhammadiyah circles until the issuance of the Decree of the Central Leadership of Muhammadiyah No. 149 of 2006 the emergence of various cases of infiltration by the Prosperous Justice Party in various Muhammadiyah environments gave birth to a firm stance to maintain the integrity of the Muhammadiyah Association by believing that even though the Prosperous Justice Party claims to be a da'wah party, the Prosperous Justice Party is still a political party that wants power, and every member of Muhammadiyah must adhere to adhere to Basic Strategies of Muhammadiyah.

Keywords: Muhammadiyah, PKS, Conflict, Infiltration.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama		Huruf Latin	Nama
ا	alif		Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ta'		b	Be
ت	ta'		t	Te
ث	Ša		š	es (dengan titik di atas)
ج	jim		j	Je
ح	h		h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		kh	ka dan ha
د	dal		d	De
ذ	žal		ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'		r	Er
ز	zai		z	Zet
س	sin		S	Es
ش	syin		Sy	es dan ye
ص	šad		Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'		Ṭ	Te
ظ	ža'		Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		'	Koma terbalik di atas
غ	gain		G	Ge
ف	fa'		F	Ef
ق	qaf		Q	Qi
ك	kaf		K	Ka
ل	lam		L	'el
م	mim		M	'em
ن	nun		N	'en
و	waw		W	W
ه	ha'		H	Ha
ء	hamzah		`	Apstrof
ي	ya'		Y	Ye

Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I
-----	d'ammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	Ā
	جاهلية		<i>jahliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تاسى	ditulis	Ā
			<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
			<i>karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
			<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu قول mati	ditulis	Au
			<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
السمش	Ditulis	<i>Asy-Syams'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

(Q.S Al-Furqan: 75)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tidak dapat dihitung satu per satu dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafa'at di hari akhir nanti, Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah subhanahu wata'ala atas segala kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Atas segala pertolongan yang Allah berikan, Alhamdulillah penulis dapat melewati segala halangan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Saroni dan Ibu Darweni yang selalu mendoakan, menyayangi dan mendukung disetiap langkah ku menuju kebaikan.
3. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teman-teman dari Prodi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2018, yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang atas perjuangannya kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan iman dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafa'at di hari akhir nanti, Amin.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai kecuali karena bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung ataupun tidak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Raqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag. Dekan, Dr. Hartono, M.Si. Wakil Dekan I, Hj. Ida Novianti, M.Ag. Wakil Dekan II, Dr. Farichatul Maftuhah, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Nasrudin M. Ag., selaku Penasihat Akademik Sejarah Peradaban Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Arif Hidayat, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
5. Nurrohim L.c, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis serta berkenan memberikan arahan, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
7. Orang tua dan sanak keluarga yang telah banyak mendukung dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga SPI 2018 yang telah menjadi teman seperjuangan selama berproses di dunia perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang tentunya

telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh pihak tersebut semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca sebagai informasi dan ilmu pengetahuan.



Purwokerto, 31 Maret 2023

Peneliti

Ananda Rizki Setiawan
NIM. 1817503004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7

2. Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : SEJARAH KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI	
KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2005-2006	19
A. Pandangan Politik Muhammadiyah	19
B. Sejarah Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan	
Sejahtera Tahun 2005-2006	26
BAB III : DINAMIKA KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI	
KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2005-2006	43
A. Dinamika Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera Tahun	
2005-2006	43
B. Reaksi Muhammadiyah Pasca Konflik	59
BAB IV : PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

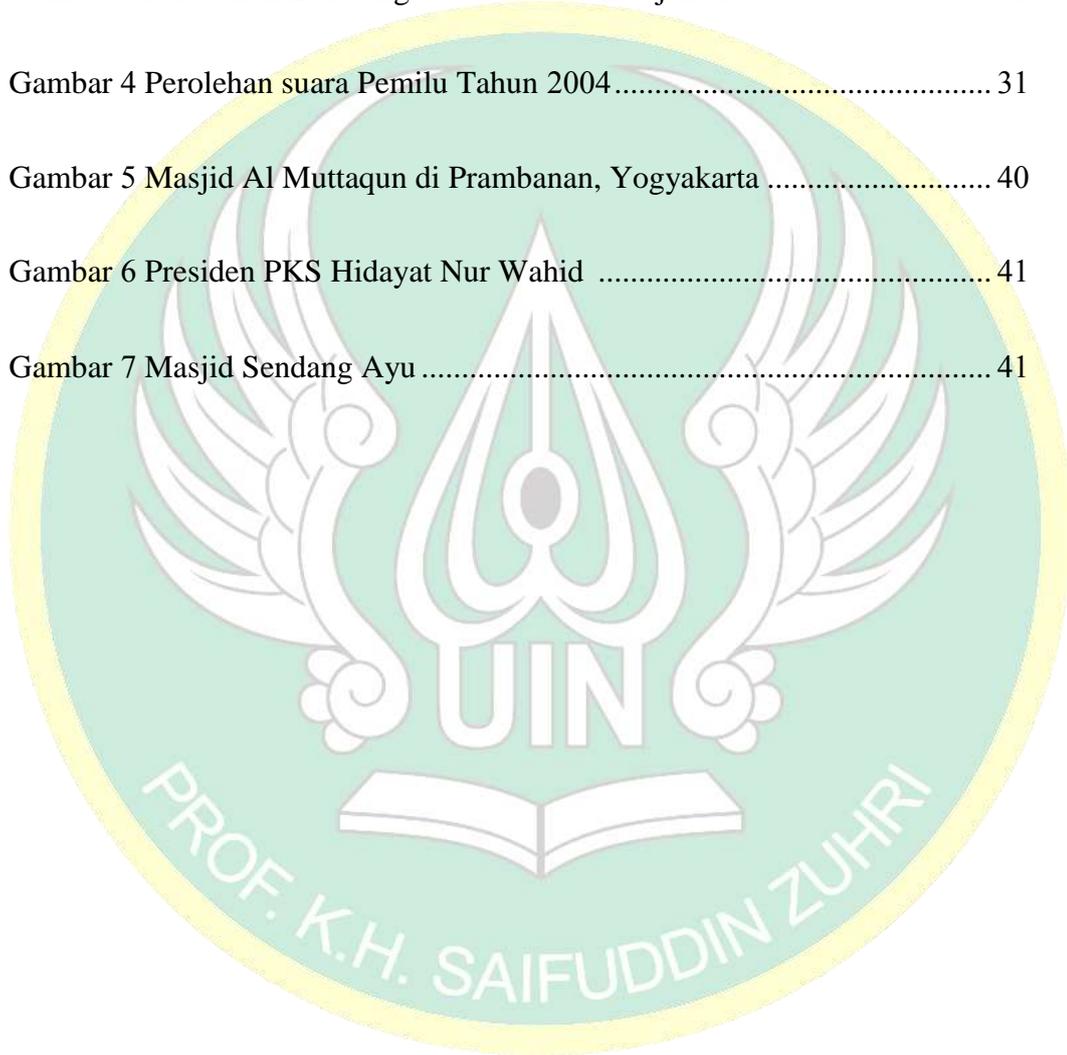
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Khittah Muhammadiyah 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lambang Partai Keadilan	28
Gambar 2 Perolehan Suara Pemilu Tahun 1999	30
Gambar 3 Perubahan Lambang Partai Keadilan Sejahtera	31
Gambar 4 Perolehan suara Pemilu Tahun 2004	31
Gambar 5 Masjid Al Muttaqun di Prambanan, Yogyakarta	40
Gambar 6 Presiden PKS Hidayat Nur Wahid	41
Gambar 7 Masjid Sendang Ayu	41



DAFTAR SINGKATAN



AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
IM	: Ikhwanul Muslimin
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
NA	: Nasyiatul Aisyiyah
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PCNA	: Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah
PDNA	: Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah
PK	: Partai Keadilan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PP	: Pimpinan Pusat
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
SIT	: Sekolah Islam Terpadu
SKPP	: Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mayoritas penduduknya beragama Islam seringkali dijadikan sasaran ekspansi bagi gerakan-gerakan Islam yang secara kultur dan ideologi tergolong asing (Wahid, 2019: 2019). Gerakan Islam memberikan pengajaran yang normatif, gerakan yang menjadikan nilai-nilai Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat namun tidak semua gerakan Islam membawa pengaruh positif terkadang gerakan Islam datang dengan membawa unsur politik yakni Khilafah Islamiyah.

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi pemaknaan akan nilai Islam memiliki berbagai macam penilaian, tafsir yang beragam sehingga memunculkan berbagai aliran, konsep dan praksisnya. Indonesia salah satunya, banyak dipengaruhi oleh pemikiran pembaharu Islam contohnya Jammaluddin Al-Afghani dari Afghanistan (1839-1897), Muhammad Abduh dari Mesir (1849-1905), Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia (1703-1793), Hassan al-Banna dari Mesir (1906-1949) dan lain sebagainya (Wahid, 2013: 3). Pembaharuan yang disebarluaskan sebagai solusi dari sifat *jumud* yang menimpa Islam membuat nilai-nilai Islam bermetamorfosis menjadi ideologi, arah perjuangan dan pergerakan, jihad sampai hingga mewujudkan tatanan masyarakat yang diimpikan.

Oleh sebab itu, Islam dimasa modern ini sering kali ditabrakan atau dihipitkan dengan politik. Islam yang dimaksud adalah Islam yang membawa kepentingan politik tertentu dan kekhususan tafsir yang dipakai sebagai legitimasi (Wahid, 2019). Kepentingan politik dan penafsiran khusus diketahui berasal dari latar belakang dari tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam yang dianut. Kultur yang melekat di dalamnya diketahui terpusat pada kawasan India dan Timur tengah (Wahid, 2019). Di India dan Pakistan terdapat gerakan Islam yang disebut *Jama'ah Tabligh*. Di Arab Saudi terdapat gerakan Islam Wahabi-Salafi. Di Yordania terdapat gerakan Islam Hizbut Tahrir. Dan di Mesir terdapat gerakan Ikhwanul Muslimin. Semua gerakan Islam tersebut telah menapakkan kaki dan berkembang di Indonesia (Wahid, 2013: 3).

Sebagai contoh Ikhwanul Muslimin atau bisa disebut dengan IM merupakan organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna, pada bulan April tahun 1928 di Mesir. Dilihat secara umum tujuan dari organisasi ini adalah menyerukan kembali ke Islam, kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menegakkan syariat Islam untuk diterapkan pada realitas kehidupan, mengulang kejayaan Islam dan menentang segala bentuk penjajahan di dunia Islam dan Kawasan Arab sekitarnya. Awalnya organisasi ini berjalan dengan lancar, mendapatkan banyak kader di Mesir dan juga luar mesir namun karena suatu hal akhirnya oleh pemerintah di cap sebagai organisasi illegal, segala asetnya dibekukan dan disita oleh pemerintah dan dianggap sebagai gerakan radikal. Organisasi

ini merupakan organisasi yang cukup besar karena telah tersebar di 70 negara yang ada di dunia.

Organisasi diatas merupakan hasil dari pemikiran pembaharuan yang tengah terjadi dalam dunia Islam. Timur tengah yang persepsikan sebagai rujukan bagi gerakan Islam di dunia termasuk Indonesia (Wahid, 2013). Setiap pemikiran pembaharuan, gagasan, dan gerakan yang berkembang di kawasan Timur tengah memiliki daya tarik tersendiri, mudah dianut, disosialisasikan serta dipraktekkan. Hasil dari pengaruh pemikiran pembaharuan Islam sampai ke Indonesia juga ditandai dengan terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis Islam atau biasa di sebut ormas Islam yang menginginkan pembaharuan Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Tarbiyah.

Gerakan/Kelompok Tarbiyah ini berkembang sekitar tahun 1980 (Nashir, 2006) bermula dari kelompok-kelompok pengajian kampus yang biasa disebut Gerakan Dakwah Kampus. Kampus yang dimaksud ialah kampus-kampus yang berbasis non-Islam. Gerakan ini memiliki hubungan yang erat dengan Ikhwanul Muslimin karena Gerakan Tarbiyah sendiri menggunakan sistem pembinaan yang mengacu pada metode atau konsep Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna (Wahid, 2009). Sebagai gerakan yang menggunakan metode pembinaan Ikhwanul Muslimin, Gerakan Tarbiyah ini tergolong sebagai gerakan yang cukup militan. Berbeda dengan organisasi Islam yang telah ada dahulu seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang memiliki corak moderat dan kultural.

Pasca tumbangnya era kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1998 Gerakan Tarbiyah ini mendirikan sebuah partai bernama Partai Keadilan, namun disebabkan pada tahun 1999 partai tersebut tidak memenuhi *electoral treshold*, partai ini merubah dirinya menjadi Partai Keadilan Sejahtera demi melangsungkan eksistensinya dalam gerakan politik praktis yang dalam penelitian ini disamakan penyebutannya menjadi PKS (Damanik, 2003: 276). Seiring berkembangnya waktu PKS membangun diri melalui kegiatan dakwah di kampus-kampus terkemuka di Indonesia.

PKS mengusung Islam sebagai ideologi politik menjadikan partai ini cukup diperhitungkan karena sebagian besar warga negara Indonesia mayoritas Islam. Dengan menjadikan Islam sebagai landasan dalam tatanan ideologis maka setiap unsur dalam agama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya yaitu kekuasaan.

Kondisi ini yang sering menjadi urusan salah kaprah karena tumpang tindihnya antara kepentingan politik dengan kepentingan agama. Persoalan konflik Muhammadiyah dengan PKS awalnya berupa konflik ideologi yang mulai merambah dalam tubuh Muhammadiyah hingga akhirnya berujung pada persoalan politik. Dinamika konflik Muhammadiyah dan PKS yang terjadi adalah perubahan bentuk konflik yang terjadi walaupun akar dari permasalahan tersebut cenderung sama. Bermula dengan slogan dakwah yang sama yakni *amar ma'ruf nahi mungkar*, justru menyebarkan pengaruh dan ideologi tarbiyah kedalam lingkungan Muhammadiyah dengan mengatas

namakan dakwah (Wahid, 2009: 20). Pada dasarnya partai politik manapun pasti menginginkan kekuasaan dan perolehan suara.

Walaupun Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, membebaskan kadernya untuk berpolitik dipartai apapun, namun Muhammadiyah punya pandangan tegas tentang sikap politik dalam khittah perjuangan Muhammadiyah. Keterbukaan atau kebebasan kader Muhammadiyah untuk berproses dipartai politik manapun sering kali terjadi benturan ideologi yang dianut Muhammadiyah dan partai politik, sehingga timbul polemik dualisme ideologi yang mengakibatkan pengeroposan dalam tubuh Muhammadiyah. Di sisi lain masjid-masjid yang termasuk tempat netral yang hanya digunakan menjadi tempat beribadah juga menambah ilmu kerap kali menjadi tempat untuk merekrut kader politik atau menjadi tempat penyebaran ideologi politik sehingga perlunya pengawasan lebih guna mengantisipasi alih fungsi masjid tersebut seperti yang terjadi pada Masjid Al Mutaqqun (Azizah dan Jamuin, 2012: 220).

Watak sebuah gerakan politik yang penuh dengan taktik dan politis banyak menimbulkan persinggungan antar gerakan politik dan ormas lain (Azizah dan Jamuin, 2012: 219). Nur Wahid mengungkapkan (2013: 6) Persinggungan Muhammadiyah dengan PKS dalam lahan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* keduanya saling berhimpitan membuatnya sulit dibedakan. Masuknya PKS ke dalam tubuh Muhammadiyah bermula dari kader tarbiyah yang menunggangi amal usaha, lembaga pendidikan, masjid, lembaga kesehatan dan fasilitas lainnya yang merupakan milik dari

Muhammadiyah. Segala aktivitas dakwah yang dilakukan PKS baik itu pengajian, pembinaan umat dan sebagainya pada dasarnya dilakukan hanya untuk kepentingan politik semata. Menurut Azizah dan Jamuin (2012: 217) PKS berusaha mendapatkan massa atau suara dari Muhammadiyah dalam rangka untuk mendukung partainya.

Sebenarnya Muhammadiyah tidak melarang PKS untuk meraup dukungan dari warga Muhammadiyah namun etika PKS yang masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah menjadikannya titik persinggungan yang akhirnya timbul polemik internal di dalam Muhammadiyah. Infiltrasi tersebut menghasilkan konflik yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia hingga pada akhirnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Menurut peneliti konflik tersebut berpengaruh bagi dinamika organisasi Muhammadiyah karena sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan pimpinan pusat yang artinya konflik tersebut termasuk dalam konflik yang besar.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi bagaimana Dinamika Konflik Muhammadiyah dan PKS tahun 2005-2006, berbagai kasus yang muncul dan bagaimana pandangan elite pimpinan Muhammadiyah mengenai persoalan infiltrasi. Di sisi lain pula masih belum banyak penelitian yang membahas tentang dinamika konflik Muhammadiyah dengan PKS secara mendalam dari sudut pandang Muhammadiyah.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang di atas, maka dapat diketahui batasan dari pembahasan adalah konflik antara Muhammadiyah dengan PKS. Penulis mengambil batasan waktu tahun 2005 karena pada tahun tersebut adalah awal mula terjadinya konflik Muhammadiyah dengan PKS sedangkan diakhir pada tahun 2006 karena terbitnya surat keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai bentuk ketegasan yang diambil oleh Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka rumusan masalah yang didapatkan asebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah konflik Muhammadiyah dan PKS tahun 2005-2006?
2. Bagaimana bagaimana dinamika konflik Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan sejarah konflik Muhammadiyah dan PKS tahun 2005-2006.
 - b. Untuk mendeskripsikan dinamika konflik Muhammadiyah dan PKS bentuk konflik yang terjadi dan faktor pendukung serta penyebabnya.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya bagi prodi sejarah ketika melakukan penelitian yang sama dan memberikan kontribusi secara ilmiah dalam memajukan ilmu pengetahuan serta dapat menambah koleksi tentang Sejarah Peradaban Islam di Perpustakaan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya:

1) Bagi Prodi

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa prodi sejarah ketika melakukan penelitian yang sama ataupun menambah koleksi tentang Sejarah Peradaban Islam di Perpustakaan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2) Bagi Muhammadiyah

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang serupa serta dapat menjadi bahan masukan bagi Organisasi Muhammadiyah dalam pengambilan sikap dan tindakan terhadap partai politik.

3) Bagi Partai Keadilan Sejahtera

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi PKS kedepannya agar tidak bersinggungan kembali dengan organisasi lain khususnya dalam hal ideologi dan menemukan

cara yang lebih efektif dalam mendapatkan simpati atau dukungan dari masyarakat.

4) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan manfaat dengan memberikan gambaran mudah tentang Organisasi Muhammadiyah dan PKS agar masyarakat lebih mengenal tujuan serta perbedaan dari keduanya.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti mengambil literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang diambil. Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang dinamika Organisasi Muhammadiyah dan konflik Muhammadiyah dengan PKS. Dari literatur tersebut penulis jadikan bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian. Literatur yang diambil penulis yang sesuai dengan tema penelitian sebagai berikut:

Pertama, buku karya Haedar Nasir yang berjudul *Manifestasi Gerakan Tarbiyah, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* diterbitkan tahun 2006 oleh Suara Muhammadiyah, Yogyakarta. Buku ini membahas tentang bagaimana awal mula PKS muncul dan hubungan PKS dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Tarbiyah. Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap Gerakan Tarbiyah. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas tentang PKS dan sikap Muhammadiyah terhadap Gerakan

Tarbiyah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis yang lebih menekankan pada dinamika organisasi Muhammadiyah pasca konflik Muhammadiyah dengan PKS.

Kedua, buku karya Abdurrahman Wahid yang berjudul *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* diterbitkan tahun 2009 oleh Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, Jakarta. Buku ini membahas tentang aktivitas gerakan Islam garis keras yang mulai merambah masuk ke Indonesia dengan cara bermetamorfosis sehingga dapat masuk ke kehidupan masyarakat. Persamaannya dengan topik penelitian yang peneliti ambil adalah sama-sama membahas tentang hubungan ikhwanul muslimin dengan PKS. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada dinamika organisasi Muhammadiyah pasca konflik dengan PKS ditahun 2006.

Ketiga, jurnal karya yang Nur Wahid berjudul *Jejak Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Memasuki Muhammadiyah: Mercermati Kasus di Yogyakarta sebagai Fenomena Politik Dakwah* dimuat dalam Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 13 No. 2 tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang intervensi PKS dalam tubuh Muhammadiyah dan konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dengan PKS. Persamaannya dengan penelitian penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang konflik Muhammadiyah dengan PKS. Perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada dinamika organisasi Muhammadiyah pasca terjadinya konflik dengan

PKS dan hubungan PKS dengan Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah dan bagaimana pengaruh dari konflik tersebut terhadap Organisasi Muhammadiyah.

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka di atas belum ditemukan pembahasan penelitian yang serupa dengan “dinamika konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera tahun 2005-2006”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan perubahan konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera di tahun 2005-2006.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Teori ini mengungkapkan bahwa setiap kelompok memiliki dua bagian kelompok berbeda yang pertama, kelompok otoritas yang memegang kendali atas kelompok. Kedua, kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang arah dan tujuannya saling bertentangan. Ralf Dahrendorf dalam gagasannya mengungkapkan bahwa berbagai posisi dalam masyarakat terdapat kualitas otoritas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi juga di dalam posisi (Khabib dkk., 2018: 10). Ralf Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi namun juga konflik antar struktur posisi; ”sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatana peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi

atau ditundukan” (Dahrendof, 1959: 165). Kunci dari teori konflik ini adalah kepentingan.

Dalam teori ini terdapat 3 bagian inti diantaranya: kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. *Pertama*, kelompok semu yang mempunyai kepentingan yang sama. *Kedua*, kelompok kepentingan bagian dari kelompok semu yang mempunyai kepentingan berbeda sehingga muncul sebuah konflik. *Ketiga*, kelompok konflik yang lahir dari kelompok kepentingan, karena kepentingannya melahirkan konflik. Ralf beranggapan bahwa tujuan utama dari konflik adalah perubahan dan perkembangan. Setelah kelompok konflik muncul maka kelompok tersebut akan melakukan tindakan yang mengarah pada perubahan sosial. Jika konflik terjadi maka akan menuai perdebatan yang hebat dan berubah menjadi gerakan radikal dan bila di sertai kekerasan maka konflik yang terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dirasa sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah akibat dari adanya kelompok kepentingan yang memperjuangkan keinginannya. Hal itu serupa dengan infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah yang pada dasarnya sama-sama bergerak pada bidang dakwah Islam dengan mengusung *amar ma'ruf nahi mungkar* atau dapat disebut dengan kelompok semu, dan PKS menghimpitkan diri kepada Muhammadiyah dengan asumsi sama-sama bergerak dalam bidang dakwah Islam namun pada dasarnya PKS

merupakan partai politik yang menginginkan suara dan kekuasaan yang dapat disebut dengan kelompok kepentingan. Kelompok terakhir adalah kelompok konflik yaitu Muhammadiyah yang memperjuangkan keutuhan organisasinya, melalui khittah perjuangan yang telah lama dirumuskan yakni bersikap netral terhadap semua kekuatan politik dan menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah tidak condong kepada partai politik manapun. Menurut Ralf Dahrendorf konflik tidak akan terlepas dari sebuah perubahan, konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dan PKS yakni infiltrasi yang dilakukan PKS ke dalam Muhammadiyah mempengaruhi pergerakan Muhammadiyah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial-historis. Pendekatan sosial digunakan untuk memaparkan dinamika konflik Muhammadiyah tahun 2005-2006 bagaimana pandangan, hubungan, sikap, tindakan dan reaksi Muhammadiyah dalam menyikapi infiltrasi yang dilakukan PKS ke dalam Muhammadiyah. Pendekatan historis digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang menyangkut unsur objek, latar belakang, tempat, waktu, kapan, dan siapa yang terlibat dalam konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dengan PKS.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai jenis sumber-sumber yang diperlukan dari buku,

surat kabar, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang di dalamnya memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan agar mendapat data atau informasi yang sesuai dengan peristiwa sejarah. Tahapan tersebut meliputi:

1. Heuristik

Pada tahapan awal peneliti mengumpulkan berbagai sumber atau data sejarah yang diperlukan guna melakukan penelitian ini. Sumber yang didapatkan dari buku dan jurnal yang kaitannya dengan penelitian ini yang diambil melalui internet berupa pdf ataupun buku dan dokumen fisik. Pada awal penelitian ini peneliti menggunakan buku dan jurnal sebagai bahan penyusun penelitian. Menurut penyampaiannya, sumber itu dibagi ke dalam sumber primer dan sekunder (Kuntowijoyo, 2013: 75). Beberapa sumber yang digunakan peneliti sebagai landasan penelitian diantaranya:

a) Sumber primer

1. Buku *Manifestasi Gerakan Tarbiyah, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* karya Haedar Nashir. Buku ini pada awalnya adalah makalah yang di sampaikan pada forum kajian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 10 Agustus 2006. serta Surat

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) nomor: 149/Kep/I.0/B/2006.

2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah.

3. Artikel Suara Muhammadiyah yang terbit pada hari Senin, 2 Januari 2006 berjudul *Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan*.

4. Artikel Suara Muhammadiyah yang terbit pada hari Senin, 20 Februari 2006 berjudul *Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mul Khan)*.

b) Sumber sekunder

1. Buku *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* karya Ali Said Damanik.

2. Buku *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* karya Abdurrahman Wahid

3. Jurnal karya Ari Nur Azizah dan Ma'arif Jamuin yang berjudul *Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah*

4. Jurnal karya Nur Wahid yang berjudul *Jejak Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Memasuki*

Muhammadiyah: Mercermati Kasus di Yogyakarta sebagai Fenomena Politik Dakwah.

5. Jurnal karya Nur Wahid yang berjudul *Jalan Dakwah PKS dalam Tubuh Muhammadiyah*

2. Verifikasi

Setelah sumber didapatkan selanjutnya peneliti melakukan verifikasi berupa kritik ekstern dan kritik intern guna mengetahui keaslian sumber dan kredibilitasnya. Kritik ekstern dilakukan pada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah dalam bentuk pdf. Dalam surat tersebut terdapat stempel Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tanda tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin, M.A beserta Sekretaris Umum Drs. H. A Rosyad Sholeh. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan memilih, membandingkan dan menggabungkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan seperti dalam buku *Manifestasi Gerakan Tarbiyah, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* karya Haedar Nashir yang berisikan pandangan Haedar Nashir sebagai warga Muhammadiyah, menunjukan sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan Muhammadiyah digabungkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP)

nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah yang diterbitkan dalam selang waktu 4 bulan kemudian pasca dibukukannya makalah tersebut. Selain itu peneliti juga menggabungkan sumber lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian serta ditemukan dalam kurun waktu yang sama, seperti surat kabar, laporan-laporan dan lain sebagainya ataupun penelitian terkini masih ada kaitannya dengan penelitian ini seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel lepas.

3. Interpretasi

Ditahap interpretasi peneliti menafsirkan data-data yang telah diverifikasi. Hal ini dilakukan agar mempermudah pembaca dapat memahami data yang telah disajikan serta dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti melakukan interpretasi salah satunya pada sumber buku *Manifestasi Gerakan Tarbiyah, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* yang ditulis oleh Haedar Nashir. Di dalam buku tersebut terdapat beberapa kata yang perlu digeneralisasikan agar dapat memudahkan pembaca menangkap isi dari penelitian ini seperti kata usrah, tarbiyah, manhaj, mabda dan lain-lain.

4. Historiografi

Tahapan terakhir historiografi yakni menuliskan kembali fakta-fakta yang telah berhasil diungkap secara ilmiah ke dalam

penelitian. Fakta-fakta sejarah yang telah diinterpretasi dari berbagai sumber yang ditemukan dituangkan ke dalam tulisan yang sistematis sesuai sistem penulisan yang berlaku. Peneliti akan menyajikannya dalam beberapa bab dan subbab supaya memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disusun ke dalam 4 bab, meliputi; Bab pertama akan diberi judul Pendahuluan. Bab memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran awal yang memberikan pengenalan dan landasan penelitian yang akan dibahas lebih rinci pada bab berikutnya.

Bab kedua berjudul Sejarah Konflik Muhammadiyah dan PKS tahun 2005-2006. Bab ini memuat tentang pandangan politik Muhammadiyah yang netral dan sejarah konflik Muhammadiyah dan PKS.

Bab ketiga berjudul Dinamika Konflik Muhammadiyah. Bab ini berisikan pandangan Muhammadiyah menyikapi infiltrasi oleh PKS dalam Muhammadiyah dan reaksi Muhammadiyah pasca konflik yang berpegang teguh pada khittah perjuangan Muhammadiyah.

Bab keempat berjudul simpulan dan rekomendasi. Bab ini akan memuat dua subbab; Simpulan dan Rekomendasi. Di dalamnya berisikan

kesimpulan dari hasil penelitian secara tegas dan lugas serta memberikan rekomendasi yang operasional berdasarkan hasil temuan penelitian. Tujuannya agar menjadi bahan pertimbangan bilamana ada yang ingin melakukan penelitian seragam.



BAB II
SEJARAH KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA TAHUN 2005-2006

A. Pandangan Politik Muhammadiyah

Islam memiliki sejarah panjang dalam pergolakan politik di Indonesia. Salah satu topik yang masih diperdebatkan hingga sekarang dikalangan umat Islam adalah relasi antara Islam dengan politik. Politik yang dimaksud adalah politik formal atau politik dalam konteks kekuasaan. Menurut sebagian umat Islam Islam mempunyai hubungan yang jelas dan kuat dalam struktur politik formal. Kelompok pertama ini mengangkat konsep *Islam wa Daulah* yakni penyatuan agama dan politik. Sebagian lainnya, umat Islam memandang Islam tidak mempunyai hubungan yang jelas dan pasti. Jika Islam terlibat dalam urusan politik itu sepenuhnya hanyalah persoalan kontemporer (sementara). Kelompok kedua ini memegang konsep *Islam wa Ummah* yakni Islam yang berorientasi pada persoalan sosial kemasyarakatan.

Menurut kelompok pertama pemisahan antara agama dan negara tidak dikenal dalam Islam. Kelompok pertama yang cenderung fundamentalis beranggapan mendirikan negara Islam merupakan bentuk dari Islam yang *kaffah*. Negara Islam yang menegakkan syariat syariat Islam. Islam yang *kaffah* adalah Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan negara maupun politik.

Berbeda dengan kelompok pertama yang identik dengan politik praktis, konsep *Islam wa Ummah* lebih dipahami sebagai *high politik* yang berarti Islam lebih memainkan politik moral, yang berpihak pada persoalan sosial dan kemanusiaan. Islam yang memperjuangkan hak-hak masyarakat sehingga para tokoh agama dan ulama berfungsi sebagai *check and balance*. Memberikan kritik dan tanggapan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, terutama persoalan substansial dan sentral seperti: keadilan, kesejahteraan, anti korupsi, supermasi hukum, peradilan yang independen dan lain-lain. Prinsip yang dijunjung oleh tokoh agama dan ulama terkait politik adalah kekuasaan yang harus diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat.

Mengutip dari Halim (2013: 27) politik hanya sekedar dimaknai, sebagaimana Harlod Laswell, sebagai kegiatan masyarakat yang berorientasi pada masalah “siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana”. Sehingga oleh para sebagian tokoh agama berkesimpulan bahwa orang yang takut kepada Allah SWT maka tidak sesuai apabila terjun ke dalam politik yang merupakan tempatnya dusta, penipuan, pengkhianatan dan tipu daya (Halim, 2013:27). Oleh sebab itu masyarakat harus memahami dan mampu membedakan antara politik praktis dan politik tinggi. Politik tinggi adalah politik yang bertujuan pada usaha dan semangat dalam memperjuangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan sedangkan politik praktis adalah politik yang berorientasi kepada

perebutan kekuasaan. Dalam konteks politik tinggi inilah Islam berperan dalam politik.

Menurut Ahmad Syafii Ma'arif dalam pandangan Islam politik hanya salah satu medium terpenting dalam mencapai tujuan dakwah bukan sebaliknya menggunakan dakwah sebagai medium tujuan politik (Ma'arif, 1995: 111). Politik Islam dapat didefinisikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai acuan, dasar tujuan serta landasan basis solidaritas Islam (Halim, 2013: 24). Dari pengertian ini dapat diambil makna bahwa pendukung dari aktivitas politik Islam tidak mesti berasal dari kalangan muslim semata namun juga dari kalangan lintas agama. Oleh sebab itu, mereka sebagai kategori politik formal dapat disebut dengan kelompok politik Islam jika ikut menekankan simbol keagamaan dalam beraktifitas politik (Halim, 2013: 24).

Subtansi politik Islam seringkali membuat Islam berhadapan dengan kekuasaan dan negara sehingga memunculkan dasar sikap dan perilaku politik serta melahirkan budaya politik yang orientasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun jika agama hadir dalam politik bukan lagi sebagai kekuatan moral yang mampu membersihkan politik dari hal-hal buruk tetapi dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk memperlanggeng kekuasaan yang korup misalnya maka menjadi berbahaya. Politik yang tujuan awalnya mulia tapi praktiknya sering disalahgunakan oleh para oknum sehingga tercoreng dan membuat kotor. Hal ini yang menyebabkan munculnya ide untuk memisahkan agama dengan politik.

Jika politik Islam diartikan dengan mengharuskan aktualisasi negara Islam atau pemerintah Islam maka akan muncul berbagai dilema. Indonesia adalah negara mayoritas penduduknya beragama Islam namun tidak begitu kondusif menerima aktualisasi pemerintahan Islam karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, serta bangsa yang beragam. Oleh karena itu, politik Islam dihadapkan dengan 3 pilihan strategis dengan konsekuensinya. *Pertama*, akomodatif justifikasi artinya kekuasaan negara atau otoritas pemerintahan tidak mencerminkan nilai-nilai Islami sehingga menimbulkan tuntutan dan pertentangan dari kalangan Islam konservatif. *Kedua*, isolatif oposisional artinya menolak sistem dan tatanan politik yang ada lalu memisahkan diri dari kekuasaan negara dengan tujuan membangun kekuatan tersendiri. Islam berperan sebagai ideologi alternatif dari ideologi negara yang berlaku. *Ketiga*, integratif kritis artinya menggabungkan diri dengan kekuasaan politik tetapi tetap kritis dalam segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan.

Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. Sebagai salah satu organisasi yang modernis, Muhammadiyah memainkan peran sebagai kelompok kepentingan. Muhammadiyah juga tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Walaupun demikian Ahmad Sholikin menjelaskan bahwa Muhammadiyah harus peduli dengan masalah perpolitikan nasional maupun internasional (Qodir, dkk. 2015 : 123). Kebijakan

Muhammadiyah dengan tidak berafiliasi dengan parpol manapun diringi dengan membebaskan hak untuk berpolitik untuk setiap warganya tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti suatu parpol. Menurut Syarifudin Jurdi dinamika politik Muhammadiyah berkembang pesat sejak masa Orde Baru hingga masa Reformas, karena banyak kader yang terjun dan terlibat dalam politik sehingga Persyarikatan disibukan dengan *lobbying* politik dan kekuasaan. Hal tersebut berakibat pada roda organisasi yang mengalami pergeseran. Dalam upaya menjaga sikap netral yang dimiliki Muhammadiyah dalam memandang politik, Muhammadiyah menegaskan sikapnya melalui Khittah Muhammadiyah.

Era reformasi menjadi musim semi bagi partai politik khususnya partai politik Islam. reformasi memberikan angin segar yang menjadi kesempatan bagi masyarakat dengan memberikan kebebasan untuk berserikat atau berkelompok. Fenomena ini merupakan cerminan dari keberagaman umat Islam di Indonesia. contoh dari partai-partai Islam antara lain: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PRB), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan lain-lain.

Pada masa Reformasi Ketua PP Muhammadiyah, Amien Rais mendirikan PAN. Muhammadiyah tidak ada hubungan PAN secara

organisasional maupun struktural. Namun fakta bahwa PAN adalah berasal dari pola pikir kader Muhammadiyah sering kali membuat Muhammadiyah terjebak dalam agenda politik. Hubungan Muhammadiyah dengan politik tergolong khas dan unik. Kekhasannya terlihat pada sikap *high politic* yang memberikan makna politik luhur. *High politic* dikatakan unik karena Muhammadiyah disatu sisi harus peduli dengan permasalahan politik dilain sisi Muhammadiyah secara institusional tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena tidak sesuai dengan prinsip Muhammadiyah yang bergerak dibidang dakwah. Sementara itu dalam banyak hal kelancaran dalam kegiatan berdakwah dan syiar Islam ditentukan pada payung politik yang ada jika Muhammadiyah tidak memilikinya maka akan banyak menemui kesulitan dan hambatan dalam aktivitas dakwahnya (Qodir, Zuly. dkk. 2015: 125).

Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Muhammadiyah memiliki lembaga di setiap bidang tersebut kecuali politik. Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada partai politik manapun baik itu yang berbasis Islam maupun nasionalis. Terdapat lima poin penting dalam perjalanan politik K.H. Mas Mansur selama menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah 1936-1942, (Qodir, Zuly dkk. 2015: 127) diantaranya:

1. Politik itu urusan penting, tetapi tidak masuk ke dalam urusan Muhammadiyah

2. Jika orang Muhammadiyah mau mengurus politik, ia harus bergerak di luar Muhammadiyah.
3. Muhammadiyah tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.
4. Bagi yang bergerak di luar Muhammadiyah, harus menelaraskan langkahnya dengan Muhammadiyah.
5. Adanya keharusan kerjasama antar sesama kelompok umat Islam

Contoh nyata pada kader Muhammadiyah Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah 1995-2000 menanggalkan jabatannya di tahun 1998 setelah mendirikan parpol PAN sebagai bentuk pengabdian kepada negeri. Secara normatif Muhammadiyah juga telah menegaskan sikap politiknya pada Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujungpandang, dalam khittahnya dijelaskan; *pertama*, Muhammadiyah dengan seluruh organisasi ortonom dibawah naungannya tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik maupun organisasi manapun. *Kedua*, anggota atau warga Muhammadiyah dengan bebas memilih sesuai kehendak diri sendiri untuk memasuki atau tidak memasuki partai politik tergantung pada hati nurani masing-masing.

Dalam Khittah Muhammadiyah 1971 menegaskan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Penyebab persinggungan Muhammadiyah dengan politik karena berusaha menghimpitkan diri

dengan politik atau sebaliknya realitas politik yang memaksa dan menuntut Muhammadiyah harus menghimpitkan diri dengan politik (Al Barbasy, 2017: 104). Khittah Muhammadiyah menjadi pembatas antara syahwat politik perseorangan yang berkiprah dalam perjuangan politik kekuasaan dengan Muhammadiyah sebagai kelembagaan yang diikuti. Parpol dan juga kekuasaan di negara mempunyai nilai penting dan strategis untuk berdakwah namun wilayah tersebut dengan sengaja tidak dipilih Muhammadiyah karena sejak kelahiran organisasi ini memposisikan diri sebagai organisasi Islam yang berkiprah pada dakwah khususnya sosial masyarakat karena Muhammadiyah berkeyakinan pembangunan masyarakat salah satu yang terpenting dan strategis dibandingkan dengan memperjuangkan dakwah melalui politik atau jalur kekuasaan negara (Qodir, Zuly dkk. 2015: 128).

Muhammadiyah menyadari bahwa politik tidak bergerak secara linear tetapi situasional dan memiliki daya tarik yang kuat oleh karena itu Muhammadiyah menetapkan batasan-batasan yang secara normatif tertulis dalam Khittah Muhammadiyah. Realitas politik yang tidak dapat tebak yang kerap memaksa dan menuntut Muhammadiyah membuat Muhammadiyah tidak bisa lepas politik. Sehingga, relasi Muhammadiyah dengan politik selalu berubah-ubah dan penuh dengan dinamika. Posisi ini yang sering kali menjadi dilema bagi Muhammadiyah.

Salah satu faktor keberhasilan Muhammadiyah dalam menjaga hubungannya dengan politik maupun negara adalah kemampuan untuk

melihat jarak antara kepentingan organisasi dengan kepentingan politik, kekuasaan, negara dalam sehari-hari. Muhammadiyah menjauhkan diri dari keterlibatan langsung politik dengan tetap menjaga karakternya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan.

B. Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera 2005-2006

Partai Keadilan atau PK terbentuk pada tanggal 20 Juli 1998 lalu dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta ditengah-tengah arus puncak pendirian partai politik. PK dibentuk oleh Gerakan Tarbiyah dengan *manhaj* tarbiyah sebagai pedoman pengkaderan anggota. Gerakan Tarbiyah juga dikenal sebagai gerakan dakwah kampus, sebelum mengenal *manhaj* tarbiyah yang dipopulerkan oleh Ikhwanul Muslimin. Kelahiran partai ini dalam rangka merespon situasi eksternal yang sedang dihadapi pada masa orde baru.

Nur Mahmudi Ismail Presiden PK pertama, menyebutkan akar historis dan ideologis PK ini sangat panjang (Damanik, 2003: 221). PK lahir dalam genre partai politik yang sangat berbeda. Dikatakan sangat berbeda karena dalam perjalanannya gerakan dakwah kampus tidak pernah diindikasikan akan terjun dan ikut terlibat ke dalam dinamika politik praktis. Dalam beberapa aspek cenderung menghindari persentuhan dengan partai politik baik dari segi aktivitasnya maupun wacanya yang dikembangkannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PK adalah partai yang tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik di masa lalu.



Gambar 1. Lambang Partai Keadilan

Partai Keadilan adalah salah satu partai baru yang sama sekali belum memiliki pengalaman politik di masa lalu akan tetapi kehadiran dan langkahnya yang fenomenal, mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan tertib menjadikan partai ini cukup diperhitungkan. Keistimewaan partai ini adalah dipimpin dan didukung oleh kalangan terpelajar yang kebanyakan dari mereka merupakan lulusan luar negeri dan memiliki hubungan yang erat dengan kampus-kampus lokal (Habibi, 2019). Basis suara dari PK berasal para aktivis gerakan dakwah kampus yang berasal dari berbagai kalangan.

Walaupun cukup diperhitungkan oleh pengamat politik namun secara umum masyarakat masih mempertanyakan kehandalan partai ini meskipun tampil dengan fenomenal masyarakat Indonesia cenderung memilih tokoh atau figur dari pada program atau visi dan misi partai. Apalagi di dalam PK ini belum ada figur yang dikenal luas oleh masyarakat dan bisa tampil memikat. Persoalan ini disadari oleh pengurus partai ini namun dengan dalih objektif mereka yang mengusung semangat moralitas dan profesionalitas, menawarkan program dan visi partai.

Namun dalam realitanya ketika publik dihadapkan dengan momentum pemilu, mayoritas masyarakat Indonesia yang secara umum

berbudaya *patron client* artinya masyarakat masih sangat suka menokohkan figur tertentu (Damanik, 2003: 275). PK sebagai pendatang baru yang tokohnya belum dikenal oleh masyarakat luas kecuali dalam lingkup terbatas mereka membuat sebagian masyarakat ragu akan partai baru ini. keseluruhan suara (Damanik, 2003: 276).

H. PEMILU 1999

Pemilu Tahun 1999 untuk memilih anggota DPR dilaksanakan serentak pada tanggal 7 Juni 1999, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Suara	Kursi Tanpa SA (*)	Kursi Dengan SA (*)
1	PDIP	35.689.073	153	154
2	Golkar	23.741.749	120	120
3	PPP	11.329.905	58	59
4	PKB	13.336.992	51	51
5	PAN	7.528.954	34	35
6	PBB	2.049.708	13	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8	PKP	1.065.686	4	6
9	PNU	679.179	3	3
10	PDKB	550.846	5	3
11	PDI	364.291	1	3
12	PDI	345.72	2	2
13	PP	655.052	1	1
14	PDR	427.854	1	1
15	PSI	375.92	1	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17	PNI Masa Marhaen	345.629	1	1
18	IPKI	328.654	1	1
19	PKU	300.064	1	1

Modul / Pemilih Untuk Pemilu 41

Gambar 2. Perolehan Suara Pemilu Tahun 1999

Keraguan ini terbukti pada pemilu tanggal 7 Juni 1999 Partai Keadilan hanya mengantongi sebesar 1,36% atau 1.436.565 suara dari jumlah. Mereka terbentur dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu yang menyebutkan bahwa batas perolehan suara sekurang-kurangnya dua persen atau 10 kursi di DPR RI. Dari hasil pemilu yang didapatkan oleh PK tersebut memaksa mereka untuk berkoalisi dengan partai lain dan membentuk fraksi. PK akhirnya berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional yang saat itu dipimpin oleh

Amin Rais. Namun hal tersebut mengubah fakta bahwa mereka terbentur ketentuan *electoral tresshold* dan jika ingin mengikuti pemilu tahun 2004 mereka harus mengganti nama partai mereka. Pada tahun 2004 akhirnya mereka mengubah nama partai menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan menambahkan kata “Sejahtera” dibawah logo mereka.



Gambar 3. Perubahan Lambang Partai Keadilan Sejahtera

Pada pemilu tahun 2004 PKS meraih suara sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil mengantarkan wakilnya ke kursi DPR sebanyak 45 orang termasuk juga Hidayat Nur Wahid yang berhasil menduduki jabatan

1. Pemilu 2004.

1. Pemilu Anggota DPR:

Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik peserta Pemilu, ternyata hanya menghasilkan 16 partai politik yang memperoleh kursi di DPR. Adapun pemilihan suara dan kursi tiap partai politik sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Salinan	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia Perjuangan	390.208	2,66	13
2	Partai Buruh Sejahtera Indonesia	434.515	0,56	0
3	Partai Bulan Bintang	2.345.090	3,62	11
4	Partai Hanura	839.705	0,74	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	8.206.486	8,78	36
6	Partai Persatuan Demokratik Kalimantan	1.318.207	1,16	4
7	Partai Pahlawan Indonesia Baru	899.832	0,29	0
8	Partai Nasional Berekang Kemanusiaan	1.328.497	1,09	0
9	Partai Demokrasi	8.432.868	7,94	32
10	Partai Keadilan dan Peradilan Indonesia	1.422.585	1,24	1
11	Partai Pengusaha Demokrasi Indonesia	844.265	0,25	0
12	Partai Pergerakan Mahasiswa Lulusan Indonesia	896.596	0,79	0
13	Partai Aksioma Nasional	7.225.231	6,41	24
14	Partai Karya Pejuang Bangsa	3.894.651	3,12	2
15	Partai Keadilan Bangsa	12.002.880	10,61	39
16	Partai Keadilan Sejahtera	8.148.437	7,25	45
17	Partai Berjuang Keadilan	2.844.228	2,68	14
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.710.006	18,31	104
19	Partai Demokrat Sejahtera	3.424.319	3,04	13
20	Partai Golongan Karya	24.461.104	21,62	128
21	Partai Pergerakan Wanita	4.178.798	3,64	16
22	Partai Sarikat Indonesia	4.772.259	4,40	0
23	Partai Pergerakan Wanita	436.472	0,56	0
24	Partai Pekerja	896.603	0,79	3
TOTAL		113.123.758	100,00	530

Ketua MPR (Basyir, 2014).

Gambar 4. Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004

PKS dapat dikatakan sebagai partai kader sebab mengedepankan mekanisme pengkaderan yang ketat lagi eksklusif dengan memiliki ketepatan yang cukup valid sehingga dapat mencetak kader yang berkualitas (Azizah dan Jamuin, 2012: 215). Kader dan simpatisan PKS kebanyakan berasal dari kalangan generasi muda, para mahasiswa dan aktivis gerakan dakwah kampus. Mengingat kantong suara dari PKS kebanyakan dari mahasiswa, kecenderungan tersebut memperlihatkan kematangan dalam pengkaderan yang dilakukan dan perhatian yang diberikan dalam perekrutan anggota partai.

Sebagai partai dakwah, menggunakan partai sebagai kegiatan dakwah PKS muncul sebagai partai peduli masyarakat, dan banyak mengadakan kegiatan berbau religius. PKS adalah satu-satunya partai Islam yang mampu menunjukkan grafik prestasi yang eksponensial naik, meningkat sepanjang sejarahnya mengikuti perpolitikan nasional tahun 1999. PKS menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi dimasa Orde Baru sebagai alat untuk berkampanye, mempromosikan keadilan dan menciptakan pemerintah yang bersih. Agenda politik PKS meletakkan strategi menaikkan penawaran politiknya lewat posisi jabatan dipublik bagi kadernya. Agenda tersebut akan menaikkan pamor PKS membuat orang banyak menyukai PKS karena membawa integritas dan komitmen yang pasti. PKS yang tadinya eksklusif berubah menjadi inklusif,

tidak banyak menampilkan sikap politiknya dalam isu penegakan korupsi dan memposisikan diri dalam perdebatan ideologis. PKS yang memilih pendekatan pragmatis berharap dapat memperluas dukungan dan basisnya. Fenomena ini disebut dengan kecenderungan sentripetal dalam partai politik (Azizah dan Jamuin, 2012: 216). Demokrasi yang sudah terinstitusionalisasi dengan baik membuat ideologi partai akan melebur ketengah membuat sekat antar ideologi partai menjadi semakin kabur, tidak jelas.

Cara PKS dalam mengorganisir massa tidak bisa dipisahkan dengan politik pencitraan. Sebagai partai politik berbasis Islam, partai dakwah ini mengambil momentum keagamaan sebagai syiar sekaligus kampanye politik. Isu-isu nasional maupun internasional dijadikan PKS sebagai ikon perjuangan dan simbol agama yang harus ada di dalamnya. Sehingga dapat memanipulasi isu tersebut dalam komoditas nilai ajaran agama untuk kepentingan partai. Politik pencitraan dilakukan oleh PKS dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan ajaran Islam menjadi kepentingan politik. Hal tersebut membuat urusan agama yang mereka sampaikan sebagai bentuk dakwah menjadi tumpang tindih dengan kepentingan politik sebagai partai politik.

Berbeda dengan PKS, Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam modernis dengan arah pergerakan sosial keagamaan ketimbang aspek politiknya. Muhammadiyah juga sebagai organisasi masyarakat Islam atau ormas Islam tidak melibatkan diri dalam lingkaran perjuangan politik

praktis yang memperebutkan kekuasaan. Meskipun pernah ikut terjun sekali dalam politik praktis yakni dalam kedudukannya sebagai anggota istimewa Masyumi dan ketika membidani Partai Muslimin Indonesia (PMI) masa awal orde baru. Keterlibatan Muhammadiyah tidak secara formal atau langsung itu tidak sampai membuat Muhammadiyah ikut eksis dalam partai politik.

Watak gerakan politik yang memiliki taktik dan strategi untuk memperoleh suara atau kekuasaan dengan cara bersaing walaupun pada akhirnya akan menimbulkan persinggungan antar partai politik ataupun partai politik dengan organisasi lain. Seperti halnya Muhammadiyah dengan PKS. Muhammadiyah tergolong organisasi massa yang berbasis Islam bergerak dalam bidang dakwah sosial keagamaan sedangkan PKS merupakan partai politik yang orientasi tujuannya adalah kekuasaan atau kedudukan. Persinggungan terjadi dikarenakan banyak aktivis dari PKS yang menggunakan fasilitas yang dimiliki Muhammadiyah untuk tujuan politik seperti lembaga pendidikan, masjid, amal usaha, dan lain sebagainya. Infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah bertujuan untuk mendapatkan dukungan massa dari Muhammadiyah.

Ketika Muhammadiyah membawa paham dan misi dengan jelas sebagai organisasi moderat sedangkan PKS hadir dengan mengembangkan konsep tarbiyah dimelekat dalam dirinya dan tidak bisa terlepas akan pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin meliputi: sistem, keyakinan, strategi, teknik dan metode tersendiri dalam pergerakannya di Mesir.

Konsep tarbiyah yang menjadi paham bagi gerakan dakwah kampus atau Gerakan Tarbiyah ini dengan jelas berlawanan dengan paham dan misi yang dimiliki Muhammadiyah, terutama konsep tarbiyah berorientasi kepada pendirian negara Islam dengan menganut sistem dan undang-undang Islam yang harus ditegakkan (Wahid, 2009: 182-183). Perkara ini menjadi masuk akal ketika Muhammadiyah menganggap hal ini merupakan ancaman bukan untuk Muhammadiyah saja namun bagi bangsa. Muhammadiyah dengan jelas tidak mempunyai cita-cita membangun negara Islam dan menerima sepenuhnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sikap Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai azas tunggal termuat dalam Muktamat ke 41 tahun 1985 di Surakarta. Berikut ini beberapa contoh kasus konflik Muhammadiyah dan PKS 2005-2006

1. Masuknya kader PKS ke dalam Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005

Infiltrasi yang dilakukan oleh PKS ke dalam Muhammadiyah mulai jelas terlihat pada Muktamar Muhammadiyah di Malang pada bulan Juli tahun 2005. Para kader PKS mampu masuk ke forum Muktamar dan mendominasi dalam banyak forum dan mampu berhasil menunjuk beberapa simpatisan untuk menjadi ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Wahid, 2009). Seorang tokoh Muhammadiyah menjelaskan bahwa infiltrasi oleh PKS dalam

tubuh Muhammadiyah dilakukan melalui anggotanya sendiri (Wahid, 2009: 184).

Upayanya yang sistematis terlihat jelas tepatnya ketika sidang komisi berlangsung. Orang-orang tertentu dengan sengaja dikirim ke dalam komisi-komisi tersebut. Wacana yang dikembangkan oleh orang-orang itu semuanya sama yakni menilai Muhammadiyah telah keluar dari syariat Islam dan tarjih yang dianut sudah berbelok keluar dari khittah. Tokoh Muhammadiyah itu juga menuturkan bahwa Buya Syafi'i (Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Maarif) mendapatkan pesan singkat yang berisi seruan agar tidak memilih orang-orang tertentu karena orang-orang tersebut perlu di Islamkan. Meski jumlah mereka tidak terhitung besar, penyusupan ideologi dan wacana oleh anggota Muhammadiyah yang merangkap di PKS mampu mendominasi dan mewarnai forum tersebut.

2. Masuknya ideologi tarbiyah kedalam lingkungan Muhammadiyah

Kasus yang terjadi pada PCNA Kecamatan Bantul periode 2004-2006 (Wahid, 2013: 7-8):

Surat dari Ketua 1 PCNA Kec. Bantul, [berinisial] TWD... tertanggal 12 Agustus 2005 tentang pengunduran diri. dalam suratnya itu [yang] bersangkutan menyatakan mengunduran diri dari jabatan Ketua PCNA Kec. Bantul pada periode 2004-2006 sembari menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa meneruskan mengemban amanah. Ternyata dua belas hari kemudian pengunduran diri

ketua itu diikuti oleh sebanyak 13 (tiga belas) fungsionaris PCNA Kec. Bantul... Klausul dalam surat mereka itu ternyata merasa lebih mantap untuk memilih jalan dakwah dengan memelihara nilai-nilai syar'ī, kata mereka. Yang membuat penulis heran ialah [mereka] merasa mantap di bidang dakwah, tetapi realitasnya masuk partai politik yang amat praktis, bahkan mereka ini tidak bisa merasakannya. Akhwat (demikian ini menurut istilah dan bahasa mereka), sedangkan bagi rekan-rekan pria mereka di sebut ikhwan yang tentu saja kependekan dan kebanggaan Ikhwanul Muslimin. Kasus lain dalam lingkup lembaga dibawah naungan

Muhammadiyah seperti Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) dan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA).

Kasus lainnya yaitu kasus PDNA, dalam sebuah penyelenggaraan rapat kerja PDNA kab. Bantul pada bulan Ramadan 1426 H/Oktober 2005. Mengutip dari Wahid, seseorang kader Nasyiatul Aisyiyah (NA) tampil menyampaikan argumentasi dan sikap *“apa salahnya seorang kader NA untuk memahami dan kemudian mengikuti ideologi lain, termasuk Ikhwanul Muslimin, sekalipun?”* sambil menyebutkan kedudukan ibundanya yang merupakan seorang aktivis Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Wahid, 2013: 7). Peristiwa tersebut membuat seluruh hadirin yang mengikuti rapat tercengang mendengarnya. Infiltrasi ideologi PKS telah masuk ketinggian yang lebih serius. .

3. Peralihan nama lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi dibawah naungan yayasan.

Selain menjangkau lembaga formal PKS juga berusaha membangun sekolah berbasis Islam sendiri yang berciri khas. Mereka menamakannya dengan Sekolah Islam Terpadu atau SIT. Sekolah tersebut telah berhasil didirikan dan tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Dalam SIT terdiri dari tingkatan taman kanak-kanak atau TK hingga sekolah menengah atas atau SMA. Jumlah TK dibawah naungan mereka saat ini mampu bersaing dengan TK yang dibawah naungan Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah. Terdapat sebuah kasus tahun 2006 sebuah TK milih Aisyiyah, ortom dibawah Muhammadiyah yang terletak di Prambanan telah berdiri selama 20 tahun akan diubah menjadi TK Islam Terpadu (TK-IT). Hal ini mendapat dukungan penuh dari Ketua MPR Hidayat Nur Wahid selaku pembina dan pengurus yayasan Islamic center yang merupakan kader dari PKS (Wahid, 2009: 206). Dari pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tentu keberatan dengan rencana tersebut sekalipun dengan alasan akan mendirikan Islamic center.

4. Penyusupan ideologi tarbiyah dan kepentingan partai melalui masjid-masjid Muhammadiyah.

Penyisipan ideologi tarbiyah juga dilakukan dalam forum-forum pengajian. Contoh kasus dalam forum pengajian di kantor pemerintahan kota Depok, Bogor. Saat itu Walikota

yang menjabat adalah Nur Mahmudi Ismail, seorang mantan presiden PKS. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Depok, Hasbullah Rachmad,. Pengajian rutin yang dibawakan oleh ustad dari fraksi PKS dikalangan birokrasi pemerintah kota Depok adalah bentuk pemaksaan. Menurut Hasbullah mereka yang ingin menaikkan karirnya diwajibkan mengikuti pengajian dari PKS (Wahid, 2009: 217).

Konflik lainnya terlihat pada masalah perebutan masjid Muhammadiyah oleh PKS yang terjadi beberapa tempat di Indonesia. Dalam perebutan masjid tersebut kader-kader PKS mula-mula ikut meramaikan kegiatan masjid dengan mengikuti kegiatan ibadah seperti sholat maupun pengajian pada umumnya. Para kader PKS yang meramaikan masjid melakukan pengamatan tentang kepemimpinan kyai atau ketua ta'mir masjid tersebut kemudian setelah dirasa cukup mereka menawarkan bantuan untuk mengkoordinir kegiatan yang ada di masjid baik lingkup kecil maupun besar. Hingga pada akhirnya koordinator kegiatan majlis dan kepengurusan masjidpun berubah dan para kader PKS tampil dengan mencatut nama salafi/sunni.

Contoh dari kasus ini adalah persengketaan Masjid Al-Muttaqun di Prambanan pada tahun 2006. Salah satu tokoh

PKS yang terlibat dalam hal ini adalah Hidayat Nur Wahid yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan juga aktivis PKS. Masjid Al-Muttaqun adalah masjid yang dikelola oleh warga Muhammadiyah.



Gambar 5. Masjid Al Muttaqun di Prambanan, Yogyakarta

Pasca terjadinya gempa bumi di Yogyakarta pada bulan Mei 2006 masjid tersebut menjadi ajang perselisihan politik antara PKS dengan Muhammadiyah. Masalah ini bermula dari PKS yang mendirikan posko bencana gempa dekat masjid tersebut. Namun posko tersebut berkembang menjadi tempat perekrutan dan pengkaderan PKS lewat kegiatan Liqo dan Mabit. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa liqo dan mabit merupakan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh gerakan dakwah kampus. Dalam kegiatan mabit dan liqo tersebut PKS memasukan agenda visi dan misi partai mereka. Hal tersebut bisa terjadi karena perjuangan dalam Islam seringkali dimaknai tidak mampu lepas dari politik praktis yang terjadi. Kemenangan PKS terlihat ketika para aktivis PKS menduduki jajaran kepengurusan ta'mir masjid Al-Muttaqun. Puncaknya

status pengelolaan masjid yang tadinya dikelola oleh Muhammadiyah dialihkan kepada Yayasan Al-Muttaqun yang di ketuai oleh Hidayat Nur Wahid.



Gambar 6. Presiden PKS Hidayat Nur Wahid
Tahun 2000-2004

Dalam kasus lain yang masih berkaitan dengan masjid Muhammadiyah terjadi di Sendang Ayu.



Gambar 7. Masjid Sendang Ayu

Masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah sejak dulu tenang dan damai menjadi rusuh karena dimasuki oleh kader PKS yang mendatangkan isu politik ke dalam masjid, gemar memberi cap kafir kepada orang lain dan menghina kelompok lain (Wahid, 2009: 23). Prof. Munir menanggapi dengan

memberikan penjelasan pada masyarakat tentang bagaimana cara Muhammadiyah mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi. Oleh sebab itu, masyarakat tidak membiarkan kader PKS masuk, datang memberikan khotbah ataupun mengisi pengajian di masjid mereka.

Walaupun PP Muhammadiyah telah mengeluarkan surat keputusan terkait infiltrasi, hal tersebut ternyata belum memberikan solusi yang efektif karena implementasi SKPP 149 bukan persoalan yang mudah. Beberapa konflik muncul setelah SKPP 149 diterbitkan seperti di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat sekitar 60 % dari dosen yang tersebar di seluruh fakultas merupakan kader dari PKS (Wahid, 2009: 211). Oleh sebab itu, banyak mahasiswa yang lebih dekat dengan KAMMI dari pada IMM. Selain itu ada pula kasus iklan politik yang memunculkan gambar tokoh dan pahlawan nasional yang dipakai PKS seperti Ir. Soekarno, K.H. Hasyim Asy'ary K.H. Ahmad Dahlan dan lain-lain menuai kontroversi karena hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap ormas Islam yang ada yang seakan-akan mendukung PKS padahal ormas seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama memiliki pandangan politik yang sama yakni netral. Generasi Muda NU menggugat PKS dengan langsung mengirimkan surat keberatan kepada DPP PKS dan meminta segera menghentikan iklan politik tersebut (Wahid, 2009: 298). Sedangkan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan tanggapan, meminta iklan tersebut dihentikan, ditarik kembali karena penggunaan gambar-

gambar tersebut tidak memberitahukan dan tidak meminta izin kepada Muhammadiyah, hal ini disebut menyalahi etika dan dianggap dapat merugikan persyarikatan (Azizah dan Jamuin, 2012: 220).



BAB III

DINAMIKA KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2005-2006

A. Dinamika Konflik Muhammadiyah

Disadur dari website KBBI, dinamika diartikan sebagai gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat. Sedangkan menurut Slamet Slamet Santoso (2004:5) dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Konflik yang terjadi gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan manusia yang bersifat *inhern* dan masyarakat menjadi tempat konflik berlangsung. Dalam pandangan Dahrendorf mengungkapkan bahwa konflik lahir dari relasi-relasi atau hubungan sosial dalam sistem dan setiap kelompok atau individu yang tidak berkaitan atau terhubung di dalam sistem tidak akan terlibat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik adalah perubahan bentuk konflik yang terjadi walaupun akar dari konflik tersebut terlihat sama.

Faktor penyebab terjadinya suatu konflik dapat ditengarai dari perbedaan pemikiran tiap-tiap individu, latar kebudayaan masyarakat yang berbeda, faktor kepentingan, interaksi sosial dan perubahan sosial. Dari berbagai faktor tersebut muncul bermacam-Tipe konflik yang digambarkan di dalamnya antara lain persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Hal terpenting dalam memahami dinamika konflik pertama dari sumber konflik dan kedua dari hubungan diantara berbagai pihak konflik

dalam hal ini PKS dan Muhammadiyah. Menurut Fisher (2001: 19) tahapan dinamika konflik terbagi menjadi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik.

Pada awalnya tidak ada masalah antara Muhammadiyah dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menggunakan sistem tarbiyah maupun gerakannya yakni gerakan dakwah kampus. Dalam lingkup gerakan Islam persamaan maupun perbedaan yang berorientasi pada paham dan gerakannya justru dapat menjadi penguat sikap kerja sama atau ukhuwah yang setidaknya saling menghormati antar sesama gerakan Islam dalam rangka *izzul Islam wa al muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin) baik di dunia Islam khususnya Indonesia.

Muhammadiyah yang dikenal dengan organisasi gerakan Islam yang modernis dan toleran yang usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Ikhwanul Muslimin. Gerakan Tarbiyah atau gerakan dakwah kampus maupun partai keadilan sejahtera. Sikap dasar dan kepribadian Muhammadiyah yang toleran, moderat, dan bijak tentu lebih dikedepankan selaras dengan dakwah Muhammadiyah yang bergerak di ranah sosial keagamaan masyarakat. Muhammadiyah tidak mengikat anggota dan warganya untuk bergabung disalah satu partai politik tertentu. Muhammadiyah membebaskan partai politik manapun untuk meraup suara dari warga Muhammadiyah dengan cara-cara yang baik.

Ideologi atau *manhaj* tarbiyah yang muncul di awal tahun 1980 yang menyangkut gerakan dakwah kampus kemudian berubah menjadi

Gerakan Tarbiyah yang melahirkan PKS sebenarnya tidak ada masalah berkembang di Indonesia. Tidak ada halangan bagi umat Islam dan masyarakat untuk mencegah apalagi menganggapnya sebagai bahaya atau ancaman (Nashir, 2006: 34). Boleh jadi dengan adanya pemahaman baru dapat memberikan kontribusi dan membawa dampak positif bagi umat Islam maupun bangsa Indonesia seperti gerakan Islam lainnya yang ada di Indonesia.

Keberadaan Gerakan Tarbiyah dan PKS jika dikaitkan dengan umat Islam dan masyarakat luas secara jelas membawa nilai positif tersendiri dalam kontribusi dakwahnya. Pihak atau gerakan Islam lainnya perlu mengakui, dan toleransi dan menghendaki saling berkerja sama dalam kebaikan (dakwah). Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk menolak ataupun menganggap PKS atau Gerakan Tarbiyah sebagai ancaman.

Kehadiran PKS dan ideologi tarbiyah adalah hak politik dan hak setiap kelompok untuk hidup serta berkembang tanpa ada halangan ataupun larangan. Apalagi jika kehadirannya membawa misi Islam untuk berdakwah dan dapat menjalin kerja sama, menjaga toleransi dan menghormati satu sama lain namun kadar sikap moderat yang dimiliki Muhammadiyah selalu berubah menyesuaikan dengan keadaan kondisi masyarakat.

Menjelang tahun 2004 Muhammadiyah mulai merasakan adanya permasalahan dengan kehadiran gerakan Islam dan paham lain dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Menurut Haedar Nashir (2006: 35)

terdapat beberapa temuan dilapangan yang menjadi indikasi infiltrasi sedang terjadi dalam Muhammadiyah yaitu adanya aktivitas sekaligus pekerja dalam amal usaha Muhammadiyah yang mengembangkan kegiatan pembinaan tarbiyah, secara terang-terang-terangan maupun tertutup. Mereka bekerja di bawah amal usaha Muhammadiyah diketahui aktif dalam partai politik Islam dan menjadi aktivis parpol membangun amal usaha lain yang persis dengan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu, TK Islam Terpadu dan lain-lain sehingga timbul pertanyaan bagaimana komitmen anggota Muhammadiyah tersebut dalam amal usaha Muhammadiyah yang seharusnya ikut membesarkan Muhammadiyah dan amal usaha di dalamnya.

Haedar Nashir mengungkapkan (2006: 36) mereka yang berada dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya amal usaha menganggap dan mengindikasikan Muhammadiyah mempunyai kecenderungan, simpati, atau afiliasi kepada paham dan parpol Islam tertentu. Berkembangnya persepsi atau pandangan negatif menimbulkan anggapan bahwa Muhammadiyah tidak mengikat anggotanya dalam amal usaha agar berideologi Muhammadiyah sehingga lebih memilih berkiprah melalui paham lain yang dianggap lebih baik.

Haedar Nashir juga mengungkapkan (2006: 37) persepsi negatif yang berkembang menimbulkan masalah baru yaitu dipersoalkannya pembelaan oleh sebagian kalangan kader Muhammadiyah saat ideologi

tarbiyah masuk ke dalam lingkungan Muhammadiyah. Dengan dalih ideologi tarbiyah membawa hal-hal positif ke dalam Muhammadiyah, mereka juga menyalahkan Muhammadiyah. Sehingga terjadi eksodus dari kalangan kader aktivis Muhammadiyah. Hal tersebut tentu membuat resah di beberapa daerah tentang kehadiran gerakan dan paham lain yaitu Gerakan Tarbiyah (PKS) dan ideologi tarbiyah dalam lingkungan Muhammadiyah, ditingkat struktural dan amal usaha yang bersifat faktual dirasakan di sejumlah daerah dan menuntut agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera menegaskan sikap atas masalah infiltrasi yang terjadi.

Sebagai contoh kasus dalam artikel Suara Muhammadiyah 2 Januari 2006 berjudul “Sendang ayu: Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan” yang ditulis oleh Prof. Abdul Munir Mulkan mengungkapkan Masjid Muhammadiyah di Desa Sendang Ayu pada awalnya damai tentram berubah menjadi rusuh karena PKS memasukan unsur politik ke dalam masjid, selain itu gemar mengkafirkan orang lain, memaki-maki kelompok lain, termasuk Muhammadiyah. Kemudian Prof. Munir memberikan masukan dan penjelasan kepada semua masyarakat tentang bagaimana caranya Muhammadiyah mengatasi persoalan perbedaan pendapat yang terjadi. Masyarakat di Sendang Ayu kemudian tidak membiarkan orang berlatar belakang PKS memberikan khutbah di masjid mereka.

Tanggapan lain mengenai masalah infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah diberikan oleh Farid Setiawan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan pandangannya dalam artikel Suara Muhammadiyah 20 Februari 2006 berjudul “Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mul Khan), mendesak Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera menangani virus kanker yang menurutnya masuk ke stadium empat, dan jika hendak berdiam diri saja tidak menutup kemungkinan kedepannya usia Muhammadiyah sebatas usia para pemimpinnya sekarang.

Kemudian selang dua bulan setelah artikel pertama karya Farid Setiawan diterbitkan, artikel kedua berjudul “Tiga Upaya Mu'allimin dan Mu'allimat” dimuat dalam Suara Muhammadiyah tanggal 3 April 2006. Nur Wahid mengutip Farid mengungkapkan bahwa:

Transformasi ideologi di kedua madrasah tersebut, lama-kelamaan mulai memudar dan bahkan mulai tidak kelihatan. Perubahan ini di samping karena tingginya persaingan serta cuaca global yang kurang mendukung perkembangannya madrasah, juga karena mewabahnya “virus tarbiyah” yang makin menggurita. “Virus tarbiyah” tersebut sebagian besar memasuki urat nadi kepengurusan madrasah, dari guru sampai pendamping asrama yang biasa disebut musyrif dan musyifah. Dalam bentuk kaderisasi, mereka cenderung menggunakan sistem yang berbeda dengan Muhammadiyah seperti Daurah, Liqa', Usrah, Daulah Islamiyah serta doktrin Jihad fi Sabilillah yang diambil sebagai jargon suci dalam membakar semangat kader. Para fungsionaris “virus tarbiyah” tersebut sangat intens dalam membina, mendampingi serta mendidik santri-santri madrasah, untuk kepentingan menjaring kader-kader partainya yang berideologi lain itu.

Ia mengusulkan penanganan dengan cara pembubaran kedua madrasah secara total dan menggantinya dengan madrasah baru serta melakukan pendampingan secara total dan langsung, kemudian merevitalisasi sistem kurikulum yang diterapkan serta penggantian kepengurusan dahulu dengan yang baru, terakhir melakukan pemberdayaan secara maksimal terhadap orntonom Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah organisasi yang terstruktur, independen, mempunyai aturan dan sistem yang jelas serta memiliki rumah tangga sendiri yang harus dirawat, dipelihara, dikembangkan, dijaga, dipertahankan dan dikokohkan oleh seluruh anggota serta warga Muhammadiyah. Oleh karena itu, ketika ada paham atau ideologi lain yang masuk ke dalam Muhammadiyah baik itu ke lingkungan Muhammadiyah maupun lini-lini rumah tangganya yang meliputi amal usaha, lembaga, fasilitas, organisasi orntonom dan lain sebagainya, Muhammadiyah akan membentengi diri dari segala paham dan ideologi diluar Muhammadiyah. Sudah menjadi kewajaran sikap tersebut dimiliki oleh setiap organisasi guna mempertahankan organisasi itu sendiri dari pengaruh luar yang boleh jadi membawa dampak buruk. Sikap tersebut seharusnya dihormati dan harus diperhatikan oleh gerakan Islam lainnya. Sikap tersebut juga harus ditunjukkan oleh seluruh anggota Muhammadiyah dan institusi yang dibawah naungan persyarikatan Muhammadiyah. Setiap lembaga, majelis, amal usaha, organisasi otonom, serta elemen-elemen dan media yang berada di lingkungan Muhammadiyah.

Masalah baru muncul ketika PKS atau paham tarbiyah masuk ke lingkungan Muhammadiyah melakukan infiltrasi secara ideologis dan paham agamanya, yang mengambil atau menarik kader Muhammadiyah bahkan lebih jauh lagi mampu membuat kegiatan di dalam Muhammadiyah. Masalah tersebut lebih dari persoalan ideologis dan ukhuwah namun juga menyangkut etika, ikhtiar sekaligus menjaga kehormatan (*murū'ah*) antar sesama gerakan dakwah Islam.

Muhammadiyah menyikapi infiltrasi yang dilakukan PKS dengan membawa ideologi tarbiyah perlu dipaparkan dan dilihat dari segala sudut pandang karena tidak sesederhana itu. Mengutip dari tulisan dari Haedar Nashir dalam makalahnya yang disajikan dalam forum kajian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah pada tanggal 10 Agustus 2006 sebagai berikut (Nashir, 2006: 40-52):

1. Muhammadiyah adalah ormas Islam independen.

Muhammadiyah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Gerakan Tarbiyah dan PKS berideologi tarbiyah adalah organisasi di luar Muhammadiyah. Organisasi atau gerakan lain di luar Muhammadiyah tidak boleh masuk dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah apalagi menyebarkan paham diluar paham Muhammadiyah dalam lingkungan Muhammadiyah. Oleh karena itu, independensi tersebut dihargai dan dihormati oleh siapapun terlebih sesama organisasi

dakwah atau gerakan Islam. Muhammadiyah selalu menghormati organisasi masyarakat atau gerakan Islam termasuk partai politik.

2. Menyamakan atau menghimpitkan diri untuk mendapat simpati dan dukungan adalah tindakan melanggar etika dan norma.

Tindakan menyamakan, menghimpitkan dan mendukung menyebarluaskan ideologi/paham lain termasuk ideologi tarbiyah dengan dalih untuk menarik simpati, dukungan suara mencerminkan tidak adanya komitmen dalam berMuhammadiyah. Jika ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari warga Muhammadiyah seharusnya menunjukkan sikap simpatik dan menjaga hubungan dengan Muhammadiyah bukan dengan menyebarluaskan ideologi dengan alasan gerakan dakwah atau partai dakwah.

3. Muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap partai politik apapun, hubungan Muhammadiyah hanya sebatas urusan politik.

Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun termasuk dengan Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Matahari Bangsa (PMB) dan lain-lain. Muhammadiyah memberikan kebebasan bagi warganya untuk menggunakan hak politiknya. Kader Muhammadiyah yang menjadi aktivis partai politik harus dapat memainkan peran dan

memposisikan diri dengan baik dan tidak boleh menghimpitkan diri antara urusan politik dengan urusan Muhammadiyah.

4. Muhammadiyah memiliki kekurangan dan kelebihan seperti organisasi lain yang memiliki kekurangan dan kelebihan.

Kekurangan atau kelemahan yang dimiliki Muhammadiyah bukan berarti dapat dimanfaatkan sebagai alasan oleh organisasi atau gerakan lain untuk membenarkan diri masuk kedalam Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah dituntut berkomitmen wajib memelihara, menjaga, merawat, dan mempertahankan keutuhan Persyarikatan Muhammadiyah.

Terbentuknya PKS dan ideologi-ideologi lainnya dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia merupakan realitas tak terbantahkan dan termasuk fakta sejarah yang pernah terjadi dan tetap eksis hingga sekarang. Infiltrasi yang semakin dalam dilakukan membuat Muhammadiyah harus memiliki disiplin sikap yang tegas. Karena melihat situasi yang meresahkan serta tuntutan diberbagai daerah di Indonesia membuat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera mengambil sikap tegas akan infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah. Sikap tegas Muhammadiyah termuat dalam Surat Keputusan No. 149/KEP/I.0/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Surat tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2006 oleh Ketua Umum Prof. Dr. H. M. Din

Syamsudin, M.A dan Sekertaris Umum Drs. H. A. Rosyad Sholeh yang kemudian lebih dikenal dengan SK 149. Di dalam SK tersebut terdapat 10 poin yang berisikan sikap tegas PP Muhammadiyah sebagai berikut 10 butir isi dari surat tersebut:

1. Muhammadiyah dengan seluruh anggota, pimpinan, amal usaha, organisasi ortonom, majelis dan lembaga, sekretariat/kantor, dan berbagai lini/struktur organisasi serta segala usaha yang berada di dalamnya harus bebas dari paham, misi dan kepentingan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung dapat merugikan dan merusak Persyarikatan Muhammadiyah
2. Secara khusus seluruh anggota dan lini organisasi persyarikatan termasuk dilingkungan amal usaha Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasai, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di bebas dari misi/kepentngan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan Khittah Muhammadiyah. hal tersebut karena selain telah menjadikan kegiatan dakwah dengan institusi/pranata umat Islam seperti masjid dan lan-lain sebagai alat/sarana politik, jua secara nyata-nyata telah menimbulkan sikap mendua di sebagian kalangan Muhammadiyah, termasuk dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai

sarana politik partai yang bersangkutan dan lebih jauh lagi dapat menimbulkan pengeroposan dan mengganggu keutuhan organisasi.

3. Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. karena itu dalam menghadapi partai politik mana pun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan dan tujuan partai politik.
4. Seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh lini Persyarikatan, termasuk yang berada di Amal Usaha, dituntut komitmen, integritas, loyalitas, pengkhidmatan, dan kiprah yang penuh dan optimal dalam menjalankan usaha-usaha, menjaga dan berpedoman pada prinsip-prinsip, membela kepentingan, serta memajukan dan memperjuangkan Muhammadiyah menuju pada pencapaian tujuannya. Jika memiliki kelebihan materi/harta, pikiran, tenaga, relasi/hubungan, jaringan, dan rizki Allah lainnya maka kerahkan/jariyahkan secara maksimal untuk membesarkan, mengembangkan, dan menyempurnakan

gerakan Muhammadiyah serta seluruh amal usaha, program, dan kegiatannya sehingga semakin mendekati pencapaian tujuan Muhammadiyah.

5. Seluruh institusi dalam Muhammadiyah termasuk amal usaha, masjid/mushalla, fasilitas milik Persyarikatan, dan kegiatan-kegiatan yang berada di dalamnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan partai politik mana pun. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dan memiliki kaitan dengan kegiatan/kepentingan partai politik, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan atau memakai simbol-simbol keagamaan/dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, yang terkait dan memiliki hubungan dengan partai politik mana pun. Maksimalkan/optimalkan seluruh institusi milik Muhammadiyah tersebut untuk sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya bagi kepentingan Muhammadiyah.

6. Seluruh anggota Muhammadiyah diminta untuk menghormati dan menaati Keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, yang menyatakan "Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah." (Lihat Lampiran I Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke 45 di Malang: Keputusan Muktamar ke-45 tentang Laporan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005, VI. Bidang Politik poin 1).

7. Seluruh media massa yang berada di lingkungan Persyarikatan diminta untuk benar-benar menyuarakan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syiar Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain.
8. Sebagai langkah konsolidasi sekaligus pencegahan dan penguatan gerakan, seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan, Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, keMuhammadiyah, dan hal-hal yang menyangkut organisasi secara luas. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sosialisasi dan pengamalan putusan-putusan Tarjih, Darul Arqam, Baitul Arqam, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Up-Grading, Refreshing, pengajian-pengajian umum dan khusus, pembinaan jamaah, pengelolaan kegiatan-kegiatan masjid dan mushalla, sosialisasi dan pengamalan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, peningkatan silaturahmi, dan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya yang dilakukan secara sistematis, intensif, berkesinambungan, dan terorganisasi dengan sebaik-baiknya. Secara khusus ditugaskan

kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, dan Majelis Pendidikan Kader dengan melibatkan Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu di bawah koordinasi Pimpinan Persyarikatan di masing-masing tingkatan.

9. Segenap Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk menegakkan disiplin organisasi, merapatkan barisan/langkah, dan mengokohkan ideologi serta misi Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi serta telah menjadi prinsip-prinsip Muhammadiyah seperti keputusan Tarjih, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Khittah Perjuangan, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah serta keputusan-keputusan Mukthamar Muhammadiyah.

10. Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang tegas dalam menegakkan misi, aturan, dan prinsip-prinsip Muhammadiyah serta dalam mencegah dan menyelamatkan

Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam SKPP 149 menyebutkan infiltrasi PKS secara eksplisit yang ditegaskan dalam poin ke 3 aktivitas dakwah PKS dalam internal Muhammadiyah seperti pengajian atau pembinaan seperti yang disebutkan dalam SKPP 149 adalah untuk kepentingan politik.

Dinamika konflik antara Muhammadiyah dan PKS dapat diketahui dalam beberapa tahapan, yaitu: *pertama* pra-konflik, dapat diketahui dari hal yang paling mendasar adalah PKS merupakan partai politik walaupun bergerak dalam ranah dakwah sebagai partai politik PKS tetap menginginkan dukungan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan berbeda dengan Muhammadiyah sebuah ormas islam yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. *Kedua*, konfrontasi PKS sebagai parpol yang bergerak dalam ranah dakwah islam yang mengangkat dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* mengihimpitkan diri ke Muhammadiyah dengan mengatasnamakan dakwah. *Ketiga*, krisis bentuk dari pergesekan yang terjadi timbul sebuah konflik infiltrasi yang terjadi dalam rentang waktu 2005-2006 mulai dari infiltrasi ideologi tarbiyah dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Malang, migrasi kader Muhammadiyah ke gerakan tarbiyah (PKS), membawa unsur politik dan pengalihan nama pengelola masjid menjadi milik yayasan. *Keempat*, akibat dari infiltrasi yang dilakukan PKS menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak dalam elite Muhammadiyah termuat dalam

surat kabar Suara Muhammadiyah hingga dijadikan makalah yang disampaikan dalam forum kajian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa tengah dan dibukukan. *Kelima*, pasca konflik menanggapi tanggapan yang ada Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan SKPP 149 yang menunjukkan sikap tegas dan eksklusif Muhammadiyah yang menyerukan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk membebaskan diri dari pengaruh dan kepentingan parpol yang mengusung dakwah sebagai landasan ideologi. SKPP 149 dibuat sebagai upaya memperkuat konsolidasi dalam Organisasi Muhammadiyah. Sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat PKS memberikan tanggapan atas dikeluarkannya SKPP 149 yang termuat dalam surat kabar Republika dan Jawa Pos tanggal 1 Oktober 2007 yang berjudul “Risalah Untuk Mengokohkan Ukhuwah dan Ishlah” yang isinya berupa klarifikasi bahwa PKS adalah partai politik dengan menjadikan partai sebagai sarana berdakwah, segala aktifitas PKS selalu mementingkan prinsip tasamuh dan ta’awun dengan tetap menghormati kekhasan yang dimiliki masing-masing ormas ataupun ideologinya, PKS tidak memiliki sekolah ataupun radio partai, namun banyak dari kader PKS yang bergerak dibidang pendidikan dan terakhir PKS menyadari sepenuhnya bahwa dirinya memiliki kekurangan dan hanya sekumpulan manusia yang memiliki banyak kesalahan sehingga PKS memohon maaf lahir dan batir apabila di lapangan dinilai telah menimbulkan banyak masalah dan PKS berkomitmen selalu terbuka dengan mendengar dan menerima nasehat dari banyak pihak.

B. Reaksi Muhammadiyah Pasca Konflik

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah yang modernis, cakupan dakwahnya bergerak pada pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi dan amal usaha lainnya. Muhammadiyah memiliki ciri yaitu dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Kedudukannya sebagai ormas Islam yang bergerak dibidang dakwah termuat pada Mukthamar Muhammadiyah ke-44, Bab 1 tentang Nama, Identitas dan Tempat Kedudukan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: *Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, berasaskan Islam, dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.* Dakwah yang secara umum bergerak dibidang pembaharuan dapat diwujudkan dengan melihat sekolah-sekolah yang dibangun Muhammadiyah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-sebagainya. Pendekatan tersebut dilakukan Muhammadiyah bukan hanya membina aqidah dan akhlak yang luhur namun juga mencakup *mu'amalah duniawiyah*. Dakwah Muhammadiyah mengajak untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari (ajaran agama Islam) kedalam kehidupan sehari-hari.

Setiap organisasi memiliki garis besar perjuangannya tersendiri, seperti Muhammadiyah yang menyebut garis besar perjuangannya dengan sebutan khittah. Khittah Muhammadiyah memiliki arti garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Khittah tersebut mengandung makna sebagai anggota Muhammadiyah harus bersikap toleran dan peduli terhadap

problematika umat, masyarakat, bangsa dan negara serta turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat.

Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*, dalam percepatan perkembangan teknologi dimasa modern ini harus senantiasa mengikuti perubahan yang terjadi serta berkepentingan di dalamnya membawa arus perkembangan tersebut kearah yang lebih baik sesuai dengan dakwahnya *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam lingkup atau wilayah dakwah yang dituju. Oleh karena itu, untuk menyukseskan usahanya tersebut Muhammadiyah harus mempunyai prinsip yang menjadi pegangan yakni Matan Keyakinan, Cita-cita Hidup Muhammadiyah dan khittah perjuangan Muhammadiyah yang menjadi landasan Persyarikatan Muhammadiyah.

Semenjak pertisipasinya terakhir dalam partai politik yaitu Masyumi dan Parmusi, Muhammadiyah selalu membentengi dirinya dengan “khittah” (garis perjuangan) yang menjadi pedoman bagi persyarikatan. Pembuktian pada khittah terlihat dari (Hazmi, 2020);

Tabel 1. Khittah Muhammadiyah

Khittah Ponorogo Tahun 1969	Khittah Ujungpandang Tahun 1971	Khittah Surabaya Tahun 1978	Khittah Denpasar Tahun 2002
<p>5. Menyerahkan kepada partai politik diluar organisasi Muhammadiyah.</p> <p>6. Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan sasaran amar makruf nahi munkar.</p> <p>7. Antara</p>	<p>3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah Islam setelah pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap partai muslimin</p>	<p>1. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai</p>	<p>Muhammadiyah tidak condong, ataupun berafiliasi terhadap parpol dan tidak memiliki hubungan secara organisatoris dengan kekuatan politik atau parpol manapun.</p> <p>Muhammadiyah selalu mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan</p>

<p>Muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris tetapi tetap mempunyai hubungan kemasyarakatan.</p> <p>8. Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri menurut caranya sendiri-sendiri.</p> <p>9. Pada prinsipnya tidak dibenarkan ada perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (spesialisasi)</p>	<p>Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya</p>	<p>Politik atau Organisasi apaun.</p> <p>2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak azasnya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah.</p>	<p>menjalankan fungsi kritik dengan menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi menegakkan sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.</p>
---	--	---	---

Dari Khittah Ponorogo (1969), saat transisi orde lama menuju orde baru Muhammadiyah dihadapkan dengan pilihan berubah menjadi partai politik tergambar bahwa secara tidak langsung Muhammadiyah sedikit condong kearah politik dapat dilihat dari poin 5-9. Khittah ini terbentuk sebagai respon atas terbentuknya Parmusi yang dibidani oleh Muhammadiyah. Namun partai ini gagal dan mengakibatkan timbul pandangan bahwa Muhammadiyah secara tidak resmi menetapkan Parmusi sebagai wadah politik anggota Muhammadiyah

Kemudian melalui Khittah Ujungpandang (1971) Muhammadiyah seakan menjaga jarak aman dengan partai politik. Padahal Muhammadiyah memiliki peranan besar dalam pendirian Parmusi, bahkan dua jabatan strategis dalam Parmusi diduduki oleh dua kader Muhammadiyah (Hazmi, 2020: 107) Djarnawi Hadikusumo sebagai ketua umum dan Lukman

Harus sebagai sekretaris jendral. Muhammadiyah tidak bisa serta merta memutuskan relasinya dengan Parmusi sebab peran besar yang dimainkan Muhammadiyah dalam pendirian Parmusi walaupun sebenarnya Muhammadiyah ingin dan sudah mencoba memutuskan keterikatan dengan partai politik manapun melalui khittah Ujungpandang.

Khittah Surabaya (1978) Muhammadiyah mempertegas relasinya dengan partai politik. Hal ini dimulai ketika Parmusi melebur kedalam wadah politik baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga dapat menjadi alasan Muhammadiyah supaya menjauh dari Parmusi.

Khittah Denpasar (2002), Muhammadiyah memutuskan secara normatif terkait posisi non afiliasi politik. Khittah tersebut menjadi landasan berpikir dan beramal bagi seluruh anggota Muhammadiyah tak terkecuali semua pimpinannya. Garis perjuangan yang dibuat oleh Muhammadiyah tidak boleh berlawanan dengan asas, tujuan dan rancangan program yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika AD/ART menjadi landasan bagi Muhammadiyah menjalankan persyarikatan maka khittah adalah landasan berperilaku bagi seluruh anggota Muhammadiyah baik untuk individu maupun kehidupan sosial bermasyarakat. Khittah tersebut digunakan sebagai pedoman sepanjang waktu sepanjang masih sesuai dan belum dibatalkan sehingga surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor 149 tahun 2006 tentang Kebijakan Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah juga mengacu pada khittah perjuangan Muhammadiyah, berikut ini

Infiltrasi yang dilakukan oleh PKS ke dalam Muhammadiyah mampu diatasi dengan baik oleh Muhammadiyah. Secara umum kondisi internal organisasi dapat terkendali dengan baik sehingga tidak mengarah kepada fragmentasi dan disintergrasi politik yang dapat membahayakan keutuhan Persyarikatan Muhammadiyah. Melalui prinsip yang tertuang dalam khittah yang dilaksanakan beberapa kali dan terus mengalami perbaikan-perbaikan memberi makna bahwa Muhammadiyah ingin melakukan penegasan ulang bahwa kebijakan dan orientasi gerakannya secara garis besar adalah untuk:

1. Menentukan batasan organisasi yang mengikat dan harus ditaati seluruh anggota sebagai pedoman, arahan, kebijakan, dan ketentuan dalam menentukan sikap dan tindakan atas nama organisasi.
2. Penegasan posisi serta peran Muhammadiyah dalam menempatkan diri secara objektif dalam wilayah kerja di lapangan dakwah terutama pembinaan masyarakat dan tidak bergerak dalam politik praktis ataupun politik yang orientasinya pada kekuasaan.
3. Menegaskan garis kebijakan organisasi menetapkan tidak memiliki hubungan secara organisatoris dengan parpol atau kekuatan politik manapun secara objektif dengan bersikap netral dan tidak menghimpitkan diri dengan mendukung atau bekerja sama secara politik dengan organisasi politik atau

partai politik manapun serta memberikan kebebasan kepada seluruh anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai politik, memilih atau tidak memilih pilihan politik karena sesuai dengan hak asasi yang dimiliki dengan ketentuan yang berlaku dipersyarikatan.

4. Menegaskan bahwa politik merupakan termasuk urusan duniawi sehingga berlaku hukum, ijtihad dan kebijakan organisasi.
5. Menegaskan peran proaktif Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara serta menentukan sikap tertentu dalam hal kebijakan negara sebagai kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan dalam posisinya disebuah negara demokratis dengan posisi sebagai kekuatan moral-keagamaan. Ketegasan Muhammadiyah untuk tidak berpolitik dalam khittahnya sejak tahun 1956 sampai dengan 2002 mengandung isyarat bahwa sebenarnya Muhammadiyah cenderung antipatif dalam menyikapi dunia politik dan menyadari banyak kemusykilan soal politik kekuasaan (Khoiri, 2013: 179).
6. Kedewasaan sikap politik yang ditunjukkan oleh para elit Muhammadiyah serta warga Muhammadiyah supaya tetap memelihara dan menjaga keutuhan Muhammadiyah dan mementingkan kepentingan Muhammadiyah diatas

kepentingan pribadi dan kelompok politik atau partai politik. Muhammadiyah memiliki prinsip menghargai ukhuwah, kerja sama, toleransi, dan sikap saling menghormati terhadap organisasi manapun, bahkan dengan non-muslim sekalipun. Namun sikap toleransi Muhammadiyah tersebut harus ada timbal baliknya dari pihak yang telah diajak bersikap toleransi untuk juga menghormati segala bentuk keputusan Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk tidak ada campur tangan, pengaruh, serta kepentingan dari pihak manapun, baik partai politik, sesama ormas Islam, maupun non-muslim. Hal ini dapat diketahui dari poin ke empat pada SK 149

7. Kebijakan dari Muhammadiyah sebagai organisasi untuk tetap menjaga jarak dan bersikap netral dari kekuatan politik maupun sebagai bentuk implikasi khittah perjuangan Muhammadiyah sehingga seluruh warga Muhammadiyah harus menghormati dan menaati keputusan tersebut. Seluruh civitas Muhammadiyah dituntut untuk memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas terhadap Muhammadiyah, seperti tercermin dalam Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Khittah Perjuangan, Himpunan Putusan Tarjih (HPT), Pedoman Hidup Islami Warga

Muhammadiyah (PHIWM), serta keputusan-keputusan resmi Muhammadiyah lainnya (Al Hamdi, 2020).

8. Kekuatan moderat dari kalangan Muhammadiyah sendiri yang muncul dari elit dan warga yang tidak terlibat langsung dalam partai politik sehingga menjadi salah satu faktor peredam dari berbagai konflik kepentingan politik. Seluruh jajaran Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom dan AUM, untuk segera melakukan penguatan ideologi dengan meningkatkan pembinaan forum-forum pengkaderan dan pengajian serta pengelolaan masjid dan mushala agar hidup kembali seusai dengan ghirah perjuangan Muhammadiyah. Revitalisasi paham keMuhammadiyahapun segera ditingkatkan juga baik untuk pimpinan maupun warga Muhammadiyah.
9. Menegaskan bahwa seluruh partai politik di Indonesia khususnya PKS merupakan kelompok politik yang berorientasi pada tujuan meraih kekuasaan politik. Walaupun PKS adalah Partai Politik bersayap dakwah namun PKS tetap Partai Politik. Seluruh civitas Persyarikatan Muhammadiyah harus bebas dari paham apapun yang merugikan dan merusak Muhammadiyah, termasuk bebas kepentingan partai politik yang juga di dalamnya partai bersayap dakwah, seperti PKS. jika tidak diambil tindakan tegas seperti ini, Amal Usaha Muhammadiyah

(AUM) hanya dijadikan alat untuk berkampanye politik sesuai kepentingan mereka.

Khittah Muhammadiyah merumuskan bahwa politik tidak dapat dihindarkan dengan dakwah selaras dengan partai politik tidak dapat digabungkan dengan organisasi dakwah. Meskipun Muhammadiyah bukan termasuk organisasi politik namun Muhammadiyah termasuk dalam perhitungan politik oleh orang-orang dari parpol dan pihak yang memiliki kepentingan politik karena Muhammadiyah dipandang mempunyai basis massa yang tergolong besar layaknya NU dan dipandang mempunyai kredibilitas yang baik oleh pandangan masyarakat luas. Menurut pandangan dari pro-politik apabila Persyarikatan Muhammadiyah bersikap aktif, maka akan banyak memperoleh keuntungan, termasuk dukungan dalam hal dana ataupun kebijakan publik. Oleh sebab itu khittah tidak mesti dimaknai pasif apalagi negatif atau anti politik (Khoiri, 2013: 181).

Ketegasan dan komitmen terhadap Muhammadiyah menurut Haedar Nashir bukanlah soal fanatisme atau sikap keras akan tetapi adalah bentuk penjagaan terhadap eksistensi gerakan sekaligus berkepihakan kepada Muhammadiyah pada saat Muhammadiyah sedang membutuhkan dedikasi kuat dari para anggota dan warganya (Al Hamdi, 2020).

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang modernis dengan menyatakan sikap netral kepada parpol manapun. Salah satu elite Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan kembali bahwa sikap politik yang ditunjukkan oleh para elite Muhammadiyah adalah respon atau sikap

dari individu bukan sikap yang mewakili Persyarikatan Muhammadiyah, sikap tersebut merupakan hak setiap warga negara dan sebagai bentuk sikap dari orang dewasa dalam menyikapi setiap perkembangan politik.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari pemaparan penelitian di atas mengenai Dinamika Konflik Muhammadiyah dan PKS tahun 2005-2006 dapat diambil sebuah kesimpulan yakni:

1. Sejarah Konflik PKS dan Muhammadiyah tahun 2005-2006

Terjadinya konflik antara PKS dengan Muhammadiyah ditahun 2005-2006 disebabkan dua hal antara lain; *Pertama*, Dengan mengatasnamakan dakwah PKS menggunakan ke dalam amal usaha, lembaga, organisasi, bahkan fasilitas yang dibawah naungan atau dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai alat untuk berkampanye. *Kedua*, etika yang dilakukan PKS dengan melakukan infiltrasi ke dalam Muhammadiyah guna memperoleh suara, dukungan dan simpati dari warga Muhammadiyah. *Ketiga*, penyebaran paham atau ideologi dan dengan misi PKS yang pada dasarnya merupakan partai politik dan partai dakwah membuat Muhammadiyah geram dan mengambil sikap tegas terhadap tindakan penyebaran ideologi PKS dalam tubuh Muhammadiyah. Semua penyebab konflik diatas yang dilakukan PKS bertujuan agar meraup suara, simpati dan dukungan dari warga Muhammadiyah dan mendapatkan kader atau simpatisan dari warga Muhammadiyah melalui pengkaderan yang PKS lakukan. Dalam

beberapa kasus yang disebutkan diatas Masjid menjadi tempat bagi PKS untuk membentuk kegiatan pengkaderan. Infiltrasi yang dilakukan PKS tampak pada Mukhtar Malang tahun 2005, aktivis banyak yang masuk dalam forum-forum mendominasi dan mewarnai. Sedangkan kasus penyebaran ideologi terjadi karena rangkap anggota atau *dual membership* menjadi anggota Muhammadiyah dan juga menjadi aktivis PKS. Penyebaran ideologi tersebut terjadi secara tidak langsung ketika seorang anggota Muhammadiyah merangkap menjadi aktivis PKS seperti pada kasus PCNA Kab. Bantul yang sebanyak 13 orang fungsionaris termasuk ketua PCNA mengundurkan diri dan mereka memilih jalan dakwah namun realitasnya mereka masuk kedalam partai politik.

2. Dinamika Konflik Muhammadiyah dan PKS Tahun 2005-2006

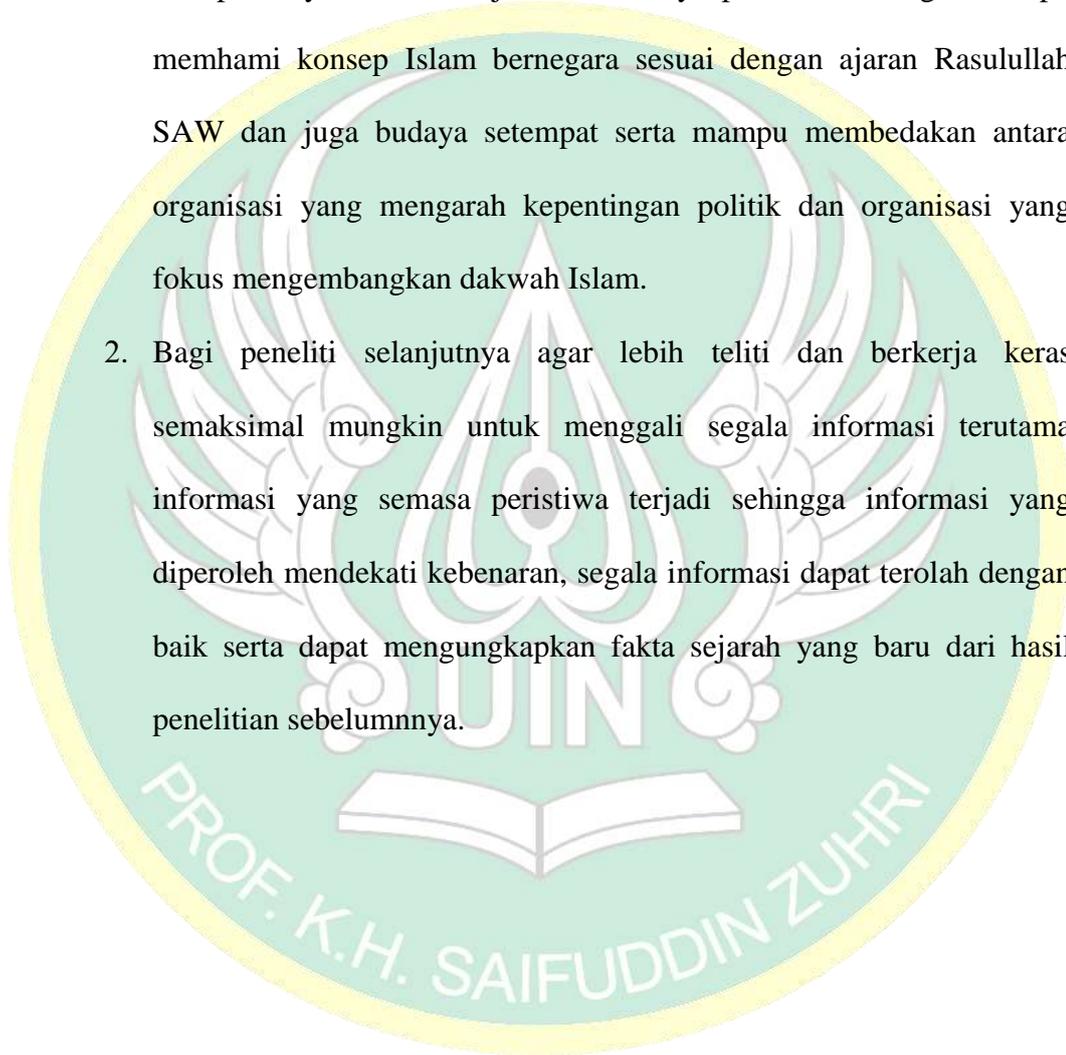
Ketidakterlibatan Muhammadiyah dalam kancah politik menjadi kekuatan tersendiri dimana Muhammadiyah dengan jumlah massa yang tergolong besar lebih memainkan peran yang berbobot yakni menjadi kelompok kepentingan yang berfungsi memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam proses perpolitikan yang ada di Indonesia. PKS sebagai partai politik dan partai dakwah melakukan infiltrasi dengan menggunakan amal usaha, lembaga, organisasi otonom dan fasilitas yang dimiliki Muhammadiyah. Tujuannya tidak lain untuk meraup suara, dukungan, dan simpati dari warga Muhammadiyah. konflik ini pada dasarnya

merupakan konflik ideologi dimana dinamika konflik Muhammadiyah dan PKS tahun 2005-2006 dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yakni *pertama* pra-konflik, PKS merupakan parpol yang menginginkan dukungan dari Muhammadiyah karena memiliki basis massa yang tergolong besar. *Kedua* konfrontasi, mulai terjadinya gesekan ideologi antara PKS dan Muhammadiyah karena PKS mengusung dakwah Islam dan berupaya menghimpit diri ke Muhammadiyah. *Ketiga* krisis, terjadi konflik infiltrasi yang dilakukan PKS dalam Muhammadiyah ditunjukkan dari berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2005-2006. *Keempat* akibat, kasus yang muncul menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai kalangan termasuk elite Muhammadiyah yang termuat dalam surat kabar Suara Muhammadiyah hingga dibukukan. Terakhir *kelima* pasca konflik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 149/KEP/I.0/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Tindakan dan sikap yang diambil oleh Muhammadiyah sebagai organisasi independen, terstruktur dan mempunyai aturan dan sistem tersendiri sudah sewajarnya mempertahankan rumah tangganya, keutuhan organisasinya dari segala paham atau ideologis yang tidak berkaitan dengan Muhammadiyah.

B. Rekomendasi

Adapun dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi antara lain:

1. Kepada masyarakat untuk seluruh lapisan agar senantiasa memperbanyak literasi sejarah khususnya politik Islam agar mampu memahami konsep Islam bernegara sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan juga budaya setempat serta mampu membedakan antara organisasi yang mengarah kepentingan politik dan organisasi yang fokus mengembangkan dakwah Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan berkerja keras semaksimal mungkin untuk menggali segala informasi terutama informasi yang semasa peristiwa terjadi sehingga informasi yang diperoleh mendekati kebenaran, segala informasi dapat terolah dengan baik serta dapat mengungkapkan fakta sejarah yang baru dari hasil penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hamdi, Ridho. 2020. *Paradigma Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Badawi, Djaldan Mh. 2007. *95 Tahun Langkah Perjuangan Himpunan Keputusan Muktamam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP/I PPM).
- Damanik, Ali Said. 2003. *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tariyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Dudung, Abdurahman. 2019. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Hazmi, M. 2020. *Ideologi Muhammadiyah*. Jember: PT. Jamus Baladewa Nusantar.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ma'rif, Ahmad Syafii. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nashir, Haedar. 2006. *Manifestasi Gerakan Tarbiyah Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rahmat, M. Imaduddin. 2005. *Arus Balik Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ridha, Abu. 1995. *Gerakan keagamaan dan pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*. Jakarta: Al-Ishlahy Press.
- Qodir, Zuly, dkk (ed). 2015. *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

Surat

- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) Nomor: 149/KEP/I.0/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah mengenai Konsolidasi dan Amal Usaha Muhammadiyah.

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPP) Nomor: 101/KEP/I.O/B/2007 tentang Ketentuan Jabaran di Lingkungan Persyarikatan yang Tidak Dapat Dirangkap dengan Jabatan Lain.

.Jurnal

Al Hamdi, Ridho. 2012. “Dinamika Islam dan Politik Elit-elit Muhammadiyah Periode 1998-2010”. *Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3, No. 1.*

Al Barbasy, Murod Ma'mun. 2017. “Muhammadiyah dan Politik”. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 34, No. 2.*

Azizah, Ari Nur dan Jamuin, Ma'arif. 2012. “Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah”. *Jurnal Tajidida, Vol. 10, No. 2.*

Basyir, Ach. 2014. “Ideologi Politik Dilematik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme”. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3, No. 2.*

Fadilah, Rizki Nur dkk. 2020. “Wajah Baru Gerakan Dakwah Kampus (Gerakan Tarbiyah) Era Sekarang”. *Jurnal Tabligh, Vol. 21, No. 1.*

Fuad, Ai Fatimah Nur. 2019. “Kajian Literatur tentang Perkembangan Historis dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah di Indonesia”. *Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 17, No. 2.*

Habibi, Mohammad Ramadan. 2019. “Partai Keadilan Sejahtera dalam Sorotan Media di Indonesia”. *Jurnal TAPiS, Vol. 15, No. 06.*

Prayogi, Aditya. 2019. “Masuk dan Berkembangnya Gerakan Tarbiyah, Studi Kasus: Gerakan Dakwah Kampus Di Institut Teknologi Bandung (ITB) 1983-1998”. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah. Vol. 1, No. 1.*

Sholikin, Ahmad. 2020. “Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik di Indonesia”. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Prodi Ilmu Politik Fisip UTA'45 Jakarta, Vol. 5, No. 2.*

Wahid, Nur. 2013. “Jalan Dakwah PKS dalam Tubuh Muhammadiyah”. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama. Vol. 5, No. 2.*

Wahid, Nur. 2019. “Jejak Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Memasuki Muhammadiyah: Mencermati Kasus di Yogyakarta sebagai Fenomena Politik Dakwah”. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial. Vol. 13, No. 2.*

Qodir, Zuly. 2008. "Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia".
Jurnal Islamica, Vol. 3, No. 1.

Makalah

Setiyawan, Khabib Bima. Dkk. 2018. "Teori Konflik: Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendor". Surakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
<https://www.researchgate.net/publication/328980540>. Diakses 8 Februari 2022, Pukul 01.03 WIB.

Majalah

Mahmudi, Yon. 2007. "PKS Mengancam Ormas Islam?", *Seputar Indonesia*. 16 Mei 2007, hlm. 7.

Artikel

<http://Muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/01/sendang-ayu-pergulatan-Muhammadiyah-di.html?m=1> , Diakses pada 2 Desember 2022, pukul 13.04 WIB.

<http://Muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/01/ahmad-dahlan-menangis-tanggapan.html> , Diakses pada 2 Desember 2022, pukul 14.15 WIB.

<https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia> , Diakses pada 4 Desember 2022, pukul 10.10 WIB.

<https://en.qantara.de/content/Islamism-in-indonesia-democracys-enemy-within> , Diakses pada 5 Desember 2022, pukul 11.04 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4788131/menelusuri-ideologi-Islamis-radikal-hingga-ke-ikhwanul-muslimin>, Diakses pada 6 Desember 2022, pukul 16.34 WIB.

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196005011986031-NANDANG_RUSMANA/Konsep_Dasar_Dinamika_Kelompok.pdf, Diakses pada 2 April 2023, pukul 07.00 WIB

<https://pkscibitung.wordpress.com/2008/07/10/risalah-untuk-mengokohkan-ukhuwah-dan-ishlah/> Diakses pada 24 April 2023, pukul 09.15 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Lambang Partai Keadilan 1999



Gambar 2. Lambang PKS Tahun 2004



Gambar 3. Partai Peserta Pemilu tahun 2004



Gambar 4. Presiden Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera (2000-2004)
Dr.H.Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA



Gambar 4. Presiden Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera (2005-2010) Ir. H Tifatul Sembiring



Gambar 5. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2000-2005) Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif



Gambar 6. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2010) Prof. Dr. Din Syamsudin M.A., Ph.D.



Gambar 7. Masjid Raya Al Muttaqun di Prambanan



Gambar 8. Masjid Taqwa Sendang Ayu di Sendang Ayu

Sabtu, 18 Februari 2017

Baca Ulang Seabad Muhammadiyah

Gatra, 9 / XIX 9 Jan 2013

Konferensi riset internasional digelar menyambut 100 tahun usia Muhammadiyah. Radikalisme kaum muda dan politik jadi isu utama. Mencuat juga isu hangat fenomena gerakan konservatisme versus liberalisme, gesekan Muhammadiyah dengan Salafi di tataran ideologi, dan Muhammadiyah dengan Partai Keadilan Sejahtera di ranah politik. Tantangan Muhammadiyah lebih banyak pada soal dakwah dan ideologi?

"Sosialisasi Poligami di Kalangan Muhammadiyah", memuat sepenggal judul berita di majalah Tabligh edisi tahun 2003. Isinya tentang Puspito Wardoyo, pelaku poligami yang juga pengusaha restoran ayam bakar Wong Solo, yang akan diundang ke kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta untuk bicara soal poligami.

Judul tersebut memang agak provokatif. Sebab terkesan bahwa Muhammadiyah mengampunikan poligami. Tapi majalah Tabligh memang khas. Majalah bulanan terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khuis (MDTK) Muhammadiyah, Jakarta, sudah lama terkenal

Sabtu, 9 Januari 2010

Ahmad Dahlan Menangis" (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mul Khan)

Suara Muhammadiyah, [Senin, 20 Pebruari 2006]

Oleh: Farid Setiawan

Membaca tulisan Abdul Munir Mul Khan (Pak Munir) di majalah Suara Muhammadiyah dengan judul "Sendang Ayu; Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan (edisi SM. No. 01/th ke 91 Januari 2006) menarik untuk dicermati. Dalam tulisannya, Pak Munir, memberi gambaran tentang sebuah kondisi pergulatan Muhammadiyah di suatu dusun yang bernama Sendang Ayu, daerah Purwodadi, Lampung Tengah. Dimana, di daerah itu mulai masuk para "mubaligh tamu" dengan membawa pesan terhadap salah satu partai politik tertentu. Pesan-pesan itu disampaikan para mubaligh tersebut melalui media pengajian rutin Sebagai salah satu basis utama cabang Muhammadiyah Purwodadi sesuai

Gambar 10. Suara Muhammadiyah, Senin 20 Februari 2006

Jumat, 8 Januari 2010

Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan

Suara Muhammadiyah, [Senin, 02 Januari 2006]

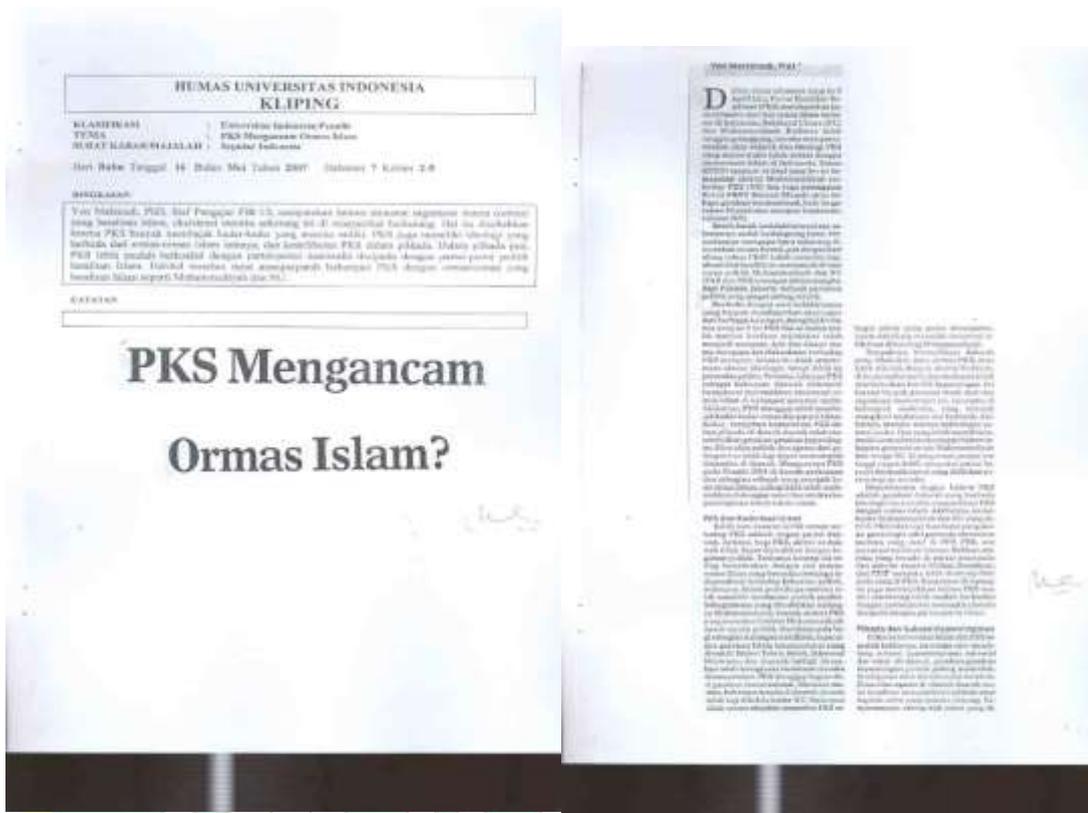
Oleh: Abdul Munir Mul Khan

<http://www.suara-muhammadiyah.or.id/new/content/view/542/27/>

Seolah melawan teori gejala kota, 20 tahun lalu Muhammadiyah menjejakkan kaki di desa Sendang Ayu yang baru beberapa tahun lalu diterangi listrik. Di daerah yang tidak tergolong makmur yang sebagian besar penduduknya tidak lulus SD ini Muhammadiyah seolah menjadi juru penerang dan bayangan matahari dunia petani. Bisa jadi sulit ditemukan padanannya ketika Islam Murni mampu dinaikkan secara dinamis di pedesaan di tengah isu tentang kematian ranting dan

Gambar 11.

Suara Muhammadiyah senin 2 Januari 2006



Gambar 12. Kliping PKS Mengancam Ormas Islam 2007



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10190/2018

This is to certify that

Name : ANANDA RIZKI SETIAWAN
Date of Birth : BANJARNEGARA, May 11th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 23rd, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 18
2. Structure and Written Expression : 30
3. Reading Comprehension : 18

Obtained Score : 450

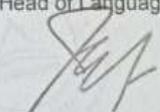


The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, November 1st, 2018
Head of Language Development Unit,


Dr. Subur, M.Ag
NIP: 19670307 199303 1 005



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROF. DR. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKARTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 904 Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.stsuisu.ac.id | www.iqia.stsuisu.ac.id | telp. (2012) 410022

وزارة الشؤون الدينية اعميرة الهندسيا

جامعة السنتا الهادي العام سيق ادين همري السانابا العلميا بيوكرتو
 وحدة اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No. B-1963/Un.19/UPT.BincPP/009/12/UK002

This is to certify that			سخت اني
Name	:	ANANDA REZKI SETIAWAN	: الاسم
Place and Date of Birth	:	Banjarnegara, 11 MEI 2000	: محل وتاريخ الميلاد
Has taken	:	IQLA	: وقد شاركات كاختبار
with Computer Based Test, organized by			على اساس الكمبيوتر
Technical Implementation Unit of Language on:		21 Oktober 2022	: التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
with obtained result as follows	:		: مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
Listening Comprehension: 51	Structure and Written Expression: 46	Reading Comprehension: 55	
قيم الفهم	قيم العباران والتراكيب	قيم الفهم	
Obtained Score :	507	المجموع الكلي :	

The test was held in (UN Professor Khat Hajj Saifuddin Zuhri Purwokerto): لم اجراء الاختبار جامعة السنتا الهادي العام سيق ادين همري السانابا العلميا بيوكرتو.



EPTUS
 English Proficiency Test of UN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
 IQLA
 Institute of Quality Test in English of Saifuddin



Purwokerto, 21 Oktober 2022

The Head,
 لجنة وحدة اللغة

(Signature)

Dr. Ade Ruswate, M. Pd
 NIP. 5060704 201503 2 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 626250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9575/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ANANDA RIZKI SETIAWAN
NIM :

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	80
# Imla'	:	80
# Praktek	:	88
# Nilai Tahfidz	:	85



Purwokerto, 13 Agt 2020



ValidationCode

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 438 Telp. 0291 63334 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 35132



No. IN.17/UPT.TIPO/021/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
85-100	A	4.0
81-84	A-	3.8
75-80	B+	3.3
71-74	B	3.0
65-70	B-	2.8

Diberikan kepada:

ANANDA RIZKI SETIAWAN
NIM: 1817503004

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 11 Mei 2000

Sebagai tanda pengesahan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	85 / A



Purwokerto, 13 Oktober 2020
Rektora UPT TIPO

[Signature]
Dr. H. Fajar Hantoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 1961215 200501 1 003



   **SERTIFIKAT**
No. B-005.h/In.17/K.PPLFUAH/KP.08.8/III/2021

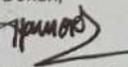
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto pada tanggal 5 Maret 2021 menerangkan bahwa:

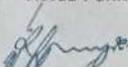
ANANDA RIZKI SETIAWAN
1817503004 | SEJARAH PERADABAN ISLAM

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto Tahun Akademik 2020/2021 yang bertempat di:
PPL Mandiri Penulisan Sejarah di Desa Masing-masing
1-15 Februari 2021
dan dinyatakan LULUS

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 9 Maret 2021

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Ketua Panitia,

Harisman, M.Ag.
NIP. 19891128201903 1 020

NILAI
A

fuah.iainpurwokerto.ac.id





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B.210/Un.19/FUAH/PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Sejarah Peradan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ananda Rizki Setiawan
NIM : 1817503004
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradan Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Konflik PKS dengan Muhammadiyah dan Dinamika Organisasi Muhammadiyah Tahun 2005-2006

Pada Hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan LULUS dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Landasan teori dirinci dan diperjelas
2. Fokuskan saja pada konflik Muhammadiyah atau rekonsiliasi Muhammadiyah pasca konflik
3. Cermati lagi pendekatan historis dan sosiologis
4. Latar belakang masalah dilengkapi dengan latar belakang konflik

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Juni 2022

Pembimbing,

Nurrohm, L.C. M. Hum.

Ketua Sidang,

Dr. H. Nasrudin, M. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uin-saiizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-39/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/1/2023

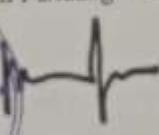
Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ananda Rizki Setiawan
NIM : 1817503004
Fak/Prodi : FUAH/ Sejarah Peradaban Islam (SPI)
Semester : 9
Tahun Masuk : 2018

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Sejarah Peradaban Islam (SPI) pada Tanggal Kamis, 05 Januari 2023: **Lulus dengan Nilai: 68 (B-)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dr. Marloni, M.Si.
NIR 197205012005011004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 404 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 625624 Faksimili (0281) 640553

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Rizki Setiawan
NIM : 1817503004
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam
Pembimbing : Nurrohm Lc., M.Hum.
Judul Skripsi : Dinamika Konflik Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sosial Tahun 2005-2006

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Kamis, 28 Oktober 2021	Pengajuan Proposal Skripsi		
2.	Rabu, 15 Juni 2022	Perbaikan Judul dan Metode Skripsi		
3.	Senin, 6 Juni 2022	Pengajuan Revisi Proposal Skripsi, ACC Proposal Skripsi		
4.	Selasa, 3 Januari 2023	Pengumpulan Skripsi BAB I, II, dan III. Perbaikan jurusan diganti dengan Studi Al-Qur'an dan Sejarah		
5.	Selasa, 14 Februari 2023	Pengajuan revisi BAB I, II, III dan pengajuan BAB IV.		
6.	Jum'at, 24 Februari 2023	Perbaikan revisi BAB II dan III penambahan referensi di BAB I		
7.	Selasa, 21 Maret 2023	Perbaikan revisi dan penambahan halaman		
8.	Jum'at, 31 Maret 2023	ACC Munqasyah		

*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunqasyahkan

Dibuat di : Purwokerto
Tanggal : 31 Maret 2023
Dosen Pembimbing

Nurrohm Lc., M.Hum.
NIP. 198709022019031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telpox (0281) 635624 Faksimil (0281) 636551 Website : www.uin-pwktu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-147/Un.19/Kalab.FU/II/PP.08.2/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sidik Fauji, M. Hum.
NIP : 199201242018011002
Jabatan : Kepala Laboratorium FUAH

Menerangkan bahwa, mahasiswa kami :

Nama : ANANDA RIZKI SETIAWAN
NIM : 1817503004
Prodi : SPI
Tahun Masuk : 2018
Judul Skripsi : DINAMIKA KONFLIK MUHAMMADIYAH DAN PARTAI
Keadilan Sejahtera Tahun 2005-2006

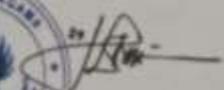
Dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut melakukan cek plagiasi terhadap skripsi pada tanggal **5 April 2023** melalui *turnitin* dengan hasil kesamaan keseluruhan ialah **24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 April 2023

Kalab FUAH,




Sidik Fauji, M. Hum.
NIP. 199201242018011002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ananda Rizki Setiawan
2. NIM : 1817503004
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 11 Mei 2000
4. Alamat : Banjengan RT 01 RW 01, Kec. Mandiraja,
Kab. Banjarnegara
5. Nama Ayah : Saroni
6. Nama Ibu : Darweni

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/ tahun lulus : SD Negeri 2 Kebakalan, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Muhammadiyah Mandiraja, 2015
3. SMA/SMK, tahun lulus : MA Negeri 1 Banjarnegara, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. IMM Ahmad Dahlan Purwokerto

Purwokerto, 2 Mei 2023



Ananda Rizki Setiawan